

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*AUDIT REPORT LAG*  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia)**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh:**

**VICKY TIKA PRATIWI**

**NIM: 1A.08.1201**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
BANK BPD JATENG  
SEMARANG  
2012**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*AUDIT REPORT LAG*  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia)**

Disusun oleh :  
Vicky Tika Pratiwi  
NIM : 1A.08.1201

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
STIE Bank BPD Jateng.

Semarang, Juni 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Winarsih, M. Si.  
NIDN: 0613086204

H. Usman Dachlan, S. Si., MT  
NIDN : 0624047001

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*AUDIT REPORT LAG*  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia)**

Disusun oleh :  
VICKY TIKA PRATIWI  
1A.08.1201

Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD  
Jateng pada tanggal : Juli 2012

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Sri Imaningati SE, Msi, Akt  
NIDN. 0611127001

.....

2. Yohana Kus S. SE, Msi.  
NIDN. 0611056902

.....

3. Dra. Winarsih, Msi.  
NIDN . 0613086204

.....

MENGESAHKAN  
Ketua STIE Bank BPD Jateng

Dr. H. Djoko Sudantoko, S. Sos, MM  
NIDN : 0607084501

## ABSTRAK

*Audit report lag* merupakan masalah yang penting karena akan berdampak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang berisi informasi yang digunakan oleh para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Semakin panjang *audit report lag*, maka kepercayaan investor juga akan berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, dan frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Prosedur pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah 22 perusahaan dengan periode pengamatan 2008-2010 dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dalam penelitian ini adalah 30,1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Kata kunci : *audit report lag*, *corporate governance*, ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, dan frekuensi pertemuan komite audit

## **ABSTRACT**

*Audit report lag is an important issue because it will affect the timeliness of financial reporting which contains information used by the users of information in decision making. The longer audit report lag will reduce the investor confidence. This study aims to test empirically the influence of corporate governance to audit report lag in manufacturing companies listed on BEI. Corporate governance variables on this research are audit committee size, proportion of independent commissioner, and frequency of audit committee meetings. This study also used control variables, there are firm size, profitability, and solvability. The sampling method was purposive sampling. Sample of this research was 22 companies with observation periode 2008-2010 and analyzed by multiple linier regression. Adjusted R<sup>2</sup> value on this research was 30,1%. The result showed that frequency of audit committee meetings has negative influence to audit report lag, while audit committee size and proportion of independent commissioner have no influence to audit report lag.*

*Keywords : audit report lag, corporate governance, audit committee size, proportion of independent commissioner, and frequency of audit committee meetings*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Vicky Tika Pratiwi

NIM : 1A.08.1201

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul

“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*“

telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, Juli 2012

ttd

Materai  
Rp. 6000

Vicky Tika Pratiwi

## PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini saya persembahkan untuk :

- ✓ Ibuku Sutilah, untuk do'a, semangat dan kasih sayang yang mengalir tiada henti
- ✓ Adikku tersayang, Cahyo Bakti
- ✓ Kakek dan nenekku tersayang, Suroto dan Rubiyah untuk semangat, kasih sayang dan do'a
- ✓ Mr. Tan Lip Jin dan Mrs. Au So Wan untuk dukungannya selama ini
- ✓ Semua teman dan sahabat yang telah memberi arti dalam hidupku
- ✓ Almamaterku

## **MOTTO**

*The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.*

**Eleanor Roosevelt**

Jangan menunda.  
Tidak akan pernah ada waktu yang tepat

**Napoleon Hill**

Kehidupan seseorang adalah apa yang diciptakan oleh pikirannya

**Marcus Aurelius**

Orang yang berhasil di dunia ini adalah orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka butuhkan dan menciptakannya.

**George Bernard Shaw**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance terhadap Audit Report Lag”** disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada STIE BANK BPD JATENG.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunannya tidak lepas dari doa, bimbingan, serta dukungan baik materiil maupun moril dari berbagai pihak sehingga terciptalah karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bimbingan, pengarahan, petunjuk dan dorongan yang telah diberikan yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM selaku ketua STIE Bank BPD JATENG
2. Ibu Nur Anissa, SE, MSi, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Bank BPD JATENG
3. Ibu Dra. Winarsih, MSi selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Bapak H. Usman Dachlan, S.Si, MT selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Suhana, S.S, MM selaku dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dari awal sebagai mahasiswa baru sampai penulis dapat menyelesaikan studi
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar STIE Bank BPD JATENG yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini

7. Seluruh staf perpustakaan STIE Bank BPD JATENG, atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
8. Ibu yang selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT, memberikan dorongan, semangat serta memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar
9. Adikku, Cahyo yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan, serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan lulus S1
10. Kakek-nenekku yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat padaku
11. Mr. James Tan, BBS., MBA dan Mrs. Marry Au (Mam) yang selalu bersedia mendengarkan, mendukung, memberi nasehat, dan menyemangati
12. Nicole Tan, *young girl* yang telah menginspirasi dalam berbagai hal
13. Paman dan Bibiku, Santoso dan Sukarti yang telah baik padaku dan memberi motivasi dalam hidupku
14. Jason Shen yang selalu memberiku semangat
15. Teman-teman kos Tini, Seli, Mbak Enta, dan Nana yang telah memberi kehidupan penuh warna.
16. Teman-teman Andry, Muyas, Aya, Dika, dan Upik yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya. Serta teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. *"I Love You All"*
17. Asus X101H dan Smartfren Connex AC682UI yang tanpa lelah membantuku dalam menyelesaikan studi serta dalam menyelesaikan skripsi.
18. Canon IP 1600 yang tanpa lelah membantuku dalam mencetak lembaran demi lembaran skripsiku

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Semoga segala dukungan serta doa yang tulus dari seluruh pihak yang telah membantu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juli 2012

Penulis

Vicky Tika Pratiwi

STIE BPD Jateng

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
1.5. Kerangka Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	15
2.2. Auditing .....	18
2.3. Laporan Keuangan.....	19
2.4. <i>Audit Report Lag</i> .....	21
2.5. <i>Corporate Governance</i> .....	26
2.5.1. Ukuran Komite Audit .....	30
2.5.2. Proporsi Komisaris Independen.....	32

2.5.3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit .....	33
2.6. Ukuran Perusahaan .....	34
2.7. Profitabilitas .....	36
2.8. Solvabilitas .....	38
2.9. Pengembangan Hipotesis.....	40
2.9.1. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i> dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas.....	40
2.9.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap <i>Audit</i> <i>Report Lag</i> dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas .....	42
2.9.3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap <i>Audit</i> <i>Report Lag</i> dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas .....	43
2.10. Model Penelitian.....	46
<b>BAB III MODEL PENELITIAN</b>	
3.1. Definisi Konsep .....	47
3.2. Definisi Operasional.....	49
3.3. Populasi dan Sampel.....	51
3.3.1. Populasi.....	51
3.3.2. Sampel .....	52
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	52
3.5. Metode Analisis Data .....	53
3.5.1. Statistik Deskriptif .....	53
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	53
3.5.3. Regresi Linier Berganda .....	55
3.5.4. Analisis Kelayakan Model Regresi .....	56
3.5.5. Uji Signifikan Parameter Individual .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	66

4.3. Analisis dan Hasil Pembahasan.....	70
4.3.1. Uji Asumsi Klasik.....	70
4.3.1.1. Uji Normalitas .....	70
4.3.1.2. Uji Multikolonieritas .....	72
4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas .....	73
4.3.2. Model Regresi.....	75
4.3.3. Analisis Kelayakan Model Regresi ( <i>Goodness of Fit</i> ) .....	77
4.3.3.1. Ukuran Kelayakan Model Regresi .....	77
4.3.3.2. Uji Kelayakan Model Regresi .....	78
4.3.4. Uji Signifikansi Parameter Individual .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	84
5.2. Keterbatasan.....	85
5.3. Saran .....	85
5.4. Implikasi Manajerial.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Proses Penentuan Sampel .....	59
Tabel 4.2	: Statistik Deskriptif .....	66
Tabel 4.3	: Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov .....	72
Tabel 4.4	: Hasil Uji Multikolonieritas .....	73
Tabel 4.5	: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser.....	75
Tabel 4.6	: Hasil Koefisien Regresi Variabel Independen.....	76
Tabel 4.7	: Uji Keباikan Model dengan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	78
Tabel 4.8	: Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	78
Tabel 4.9	: Hasil Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t).....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Penelitian.....	14
Gambar 2.1 : Model Penelitian.....	46
Gambar 4.1 : Grafik Bivariate Ukuran Komite Audit dan <i>Audit Report Lag</i>	67
Gambar 4.2 : Grafik Bivariate Proporsi Komisaris Independen dan <i>Audit Report Lag</i> .....	68
Gambar 4.3 : Grafik Bivariate Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan <i>Audit Report Lag</i> .....	68
Gambar 4.4 : Hasil Uji Normalitas Grafik .....	70
Gambar 4.5 : Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot.....	71
Gambar 4.6 : Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Perusahaan Sampel
- Lampiran 2 : Data-data Variabel Penelitian Tahun 2008
- Lampiran 3 : Data-data Variabel Penelitian Tahun 2009
- Lampiran 4 : Data-data Variabel Penelitian Tahun 2010
- Lampiran 5 : Data Penelitian
- Lampiran 6 : Hasil Olah Data

STIE BPD Jateng

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan instrumen penting yang menyediakan berbagai informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan. Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan haruslah berkualitas bagi para penggunanya dan bisa membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan sebagai investor perusahaan. Laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu *relevance*, *reliable*, *comparability*, dan *consistency*. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu dan keakuratan penyajian suatu informasi akan menentukan seberapa besar manfaat yang diberikan dari sebuah informasi pada saat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Suwardjono (2002:170) menyatakan bahwa ketepatwaktuan informasi mengandung pengertian informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Apabila laporan keuangan tidak disajikan tepat waktu, maka laporan tersebut akan kehilangan nilai informasinya dan informasi yang memiliki prediksi tinggi dapat menjadi tidak relevan karena tidak tersedia saat pemakai laporan keuangan membutuhkannya untuk pengambilan keputusan. Hal ini diatur di dalam PSAK tahun 2007 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, yaitu bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Menurut Givolvy dan Palmon (1982), nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (2002:1.6) juga mengemukakan bahwa manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya, dan faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu. Hal ini serupa dengan kesimpulan Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dianggap sebagai *good news* maupun *bad news*. Apabila pengumuman laba berisi berita baik maka perusahaan cenderung melaporkan tepat waktu, sedangkan jika pengumuman laba berisi berita buruk maka pihak manajemen lebih cenderung untuk menunda pelaporan keuangannya. Hal ini sesuai dengan Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami rugi cenderung memerlukan proses pengauditan yang lebih lama. Akibatnya, akan terjadi keterlambatan dalam menyampaikan hal tersebut kepada publik. Selain itu, auditor independen sering kali memerlukan waktu yang cukup panjang dalam menilai kewajaran penyajian suatu laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian intern yang kurang baik (Petronila, 2007).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Standar Pekerjaan Lapangan mengatur mengenai prosedur penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor. Auditor perlu memiliki perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan. Juga perlu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Hal ini juga dapat menyebabkan lamanya proses audit, karena auditor dituntut untuk teliti dan cermat, serta memenuhi semua standar yang

berlaku agar diperoleh pendapat yang sesuai dan benar , serta untuk meningkatkan kualitas audit.

Auditor independen memiliki peranan yang sangat penting dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Mereka berkewajiban untuk memberikan pendapat dan menilai kewajaran suatu laporan keuangan agar laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu dan dapat memberikan informasi yang relevan serta akurat bagi para penggunanya. Karena kewajiban itulah, maka auditor dituntut untuk memiliki independensi yang tinggi. Ini sesuai dengan pernyataan Arrens, dkk. (2008:4) bahwa “Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Apabila informasi keuangan disajikan dari sumber yang kurang independen, informasi dari laporan keuangan tersebut akan disangsikan oleh para penggunanya. Penyaji informasi keuangan mungkin akan menghadapi *conflict of interest* (konflik kepentingan) baik yang disengaja maupun tidak sengaja dengan pengguna informasi keuangan tersebut. Jadi, independensi auditor merupakan suatu keharusan bagi para pengguna untuk mempercayai bahwa audit tersebut bernilai dan untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangan entitas.

Audit yang dilakukan auditor independen tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam menghasilkan laporan audit yang tepat waktu. Hambatan tersebut diantaranya adalah dilema etika, yaitu ketika auditor menghadapi klien yang mengancam akan mencari auditor baru kecuali bersedia menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian, padahal hal tersebut tidaklah tepat. Selain itu, banyaknya bukti-bukti yang harus dikumpulkan dan penilaian yang rumit juga dapat menjadi hambatan karena auditor harus menugaskan staf yang lebih berpengalaman untuk melakukan pengujian. Hambatan yang lainnya adalah adanya resiko kecurangan, seperti sistem pengendalian yang digunakan oleh klien apakah dapat mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, serta mengurangi salah saji yang

material akibat kecurangan. Pemahaman prinsip dan standar akuntansi dalam prosedur audit juga harus diperhatikan oleh auditor untuk mengurangi resiko kecurangan, karena biasanya pelaku kecurangan sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilaksanakan. Untuk itu, SAS 99 mengharuskan unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit, misalnya auditor mendatangi lokasi persediaan atau menguji akun-akun yang belum diuji dalam periode sebelumnya. Auditor juga harus mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai klien, jenis usahanya, industrinya, risiko yang dihadapinya, bagaimana mereka menghadapi resikonya, dan sisa resiko apa yang kemungkinan menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan untuk dapat melaksanakan audit dengan baik.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam Undang-undang no.8 tahun 1995 (Subekti dan Widiyanti, 2002 dalam Lianto dan Kusuma, 2010). Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan mengumumkannya kepada masyarakat. Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini kemudian diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996 dan mulai berlaku kembali pada tanggal 17 Januari 1996. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak berakhirnya tahun buku. Pada 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan mengeluarkan lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Periode waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen tersebut mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Lamanya waktu penyelesaian audit inilah yang sering disebut *audit report lag*. Menurut Wah Lai dan Cheuk

(2005), “An audit report lag or audit delay is a period from a company’s year-end date to the audit report date”. Definisi tersebut sesuai dengan Hossain dan Taylor (1998) yang berpendapat “audit delay has been considered as the time from a company’s accounting year end to the date of the auditor’s report. Semakin panjang suatu *audit report lag*, maka akan memberikan dampak negatif. Lamanya waktu penyelesaian proses audit (*audit report lag*) yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif dan denda yang cukup berat. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu karena berbagai alasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI, diketahui bahwa pada tahun 2009 terdapat 40 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2008. Untuk tahun 2010, terdapat 50 emiten yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan (LKT) 2009. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan 2010 juga hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 40 emiten atau sekitar 10% dari 421 perusahaan yang terdaftar di BEI.

Menurut Mohamad-Nor, dkk. (2010), keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan dan memperburuk asimetri informasi. Pasar modal akan mengalami reaksi negatif dengan adanya keterlambatan informasi, karena di dalam laporan keuangan auditan memuat informasi penting, seperti laba yang dihasilkan perusahaan bersangkutan. Informasi ini selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Hal ini berarti, informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Masalah jangka waktu proses penyelesaian audit (*audit report lag*) ini dapat dicegah dan diatasi dengan adanya suatu aturan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Salah satu parameter keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* yaitu meningkatnya integritas laporan keuangan perusahaan yang antara lain terlihat dari ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaan perusahaan yang baik, diantaranya adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independence*), dan keadilan (*fairness*). Komponen-komponen *good corporate governance* tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan; menghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan; memastikan keberhasilan perusahaan dalam berbagai aspek seperti kinerja perusahaan, kegagalan perusahaan, kualitas audit, pelaporan lingkungan, dan manajemen laba.

Berangkat dari paparan mengenai banyaknya perusahaan yang masih mengalami keterlambatan pelaporan keuangan yang telah disampaikan di atas, maka perlu dilakukan investigasi mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaporan keuangan, khususnya dalam hal *corporate governance* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mohamad-Nor, dkk. (2010). Mohamad-Nor, dkk. (2010) melakukan penelitian mengenai variabel-variabel *corporate governance* yang berpengaruh terhadap *audit report lag*, yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, pertemuan komite audit, komite audit ahli keuangan, ukuran dewan, direksi independen, dan dualitas CEO.

Penelitian-penelitian mengenai *audit report lag* telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di Indonesia, penelitian mengenai *audit report lag* telah dilakukan oleh Prabandari dan Rustiana (2007), Petronila (2007), Rahmawati (2008), Iskandar dan Trisnawati (2010), serta Lianto dan Kusuma

(2010). Sedangkan penelitian di luar negeri diantaranya dilakukan oleh Mohamad-Nor, dkk (2010).

Prabandari dan Rustiana (2007) mengkaji mengenai pengaruh faktor ukuran perusahaan, *debt to total asset*, pengumuman laba atau rugi, opini audit, dan ukuran KAP terhadap *audit delay*. Sampel yang digunakan dalam penelitian Prabandari dan Rustiana (2007) adalah semua perusahaan dalam industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2002 sampai 2004 yang dipilih dengan cara *purposive sampling*. Dari beberapa faktor tersebut, hanya ada dua faktor yang tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, yaitu *debt to total asset* dan ukuran KAP.

Selanjutnya Petronila (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penentu audit delay. Dengan sampel sebanyak 135 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003, Petronila mengkaji faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, KAP, opini audit, *extraordinary items*, dan umur perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari keenam faktor tersebut hanya ada satu faktor yang tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, yaitu KAP.

Rachmawati (2008) meneliti pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap *audit delay* dan *timeliness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2005. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, size perusahaan, dan ukuran KAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi audit delay adalah size perusahaan, sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap *audit delay* adalah ukuran KAP.

Iskandar dan Trisnawati (2010) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh dari ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, klasifikasi industri, laba atau rugi tahun berjalan, opini audit, besarnya KAP, dan *debt proportion* terhadap *audit delay*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya klasifikasi industri, laba atau rugi tahun berjalan, dan besarnya KAP yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.



Lianto dan Kusuma (2010) juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penentu *audit report lag*, yang diantaranya adalah profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya dua faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*, yaitu profitabilitas dan solvabilitas.

Penelitian-penelitian mengenai *audit report lag* di atas lebih mempertimbangkan aspek internal dan eksternal perusahaan, seperti faktor-faktor keuangan, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk aspek *corporate governance* belum dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian tersebut. Mohamad-Nor, dkk. (2010) melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan mempertimbangkan aspek *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada tahun 2002. *Corporate governance* merupakan suatu sistem dimana perusahaan itu dijalankan dan dikendalikan, sehingga akan sangat mempengaruhi pelaporan keuangan dari suatu perusahaan. Variabel *corporate governance* yang digunakan oleh Mohamad-Nor, dkk. (2010) adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, pertemuan komite audit, komite audit ahli keuangan, ukuran dewan, direksi independen, dan dualitas CEO. Selain itu, Mohamad-Nor, dkk. (2010) juga menambahkan lima variabel kontrol untuk memperkuat hasil penelitiannya, yaitu kualitas perusahaan audit, *busy period*, kompleksitas klien, resiko bisnis klien, dan ukuran perusahaan. Hasil dari Mohamad-Nor, dkk. (2010) menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* adalah ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit, sedangkan untuk variabel yang lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*.

Penelitian Mohamad-Nor, dkk. (2010) menggunakan variabel yang lebih spesifik dibandingkan penelitian yang lainnya. Penelitian tersebut secara spesifik meneliti tentang aspek *corporate governance* terhadap *audit report lag*. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian lainnya meliputi beberapa aspek

sekaligus, misalnya aspek internal dan eksternal perusahaan dalam penelitian Rachmawati (2008), sehingga hasil penelitian menjadi tidak spesifik dalam mempengaruhi *audit report lag*. Selain itu, kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian Mohamad-Nor, dkk. (2010) juga lebih baik, diantaranya dengan tidak memasukkan sampel yang baru saja terdaftar, tidak memiliki data lengkap, memiliki data yang ambigu, tidak memiliki laporan auditor independen, serta tidak menerbitkan laporan tahunan perusahaan. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian Mohamad-Nor, dkk. (2010) hanya meliputi perusahaan-perusahaan non keuangan, tetapi penggunaan sampel perusahaan non keuangan ini memiliki alasan yang cukup kuat, yaitu karena perbedaan regulasi antara jenis perusahaan keuangan dan non keuangan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia dan Malaysia menggunakan sistem tata kelola (*corporate governance*) yang sama, yaitu *two tier system*. Menurut FCGI (2000), perusahaan yang menggunakan sistem *two tier* mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Pada sistem *two tier*, anggota dewan direksi diangkat dan dapat diganti setiap waktu oleh badan pengawas (dewan komisaris), sedangkan anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Selain itu, dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris.

Anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik di Indonesia mengenai tata kelola perusahaan yang baik, terutama agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun 2000. Pada tahun yang sama *The Malaysian Code on Corporate Governance* juga baru saja diterbitkan dan dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengangkat anggota dewan. Dengan adanya persamaan tahun pemberlakuan peraturan *corporate governance* ini, maka dapat diperkirakan bahwa perkembangan *corporate governance* di Indonesia tidak jauh berbeda dengan Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas mengenai adanya persamaan karakteristik tentang sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan tahun pemberlakuan peraturan *corporate governance* di Indonesia dan Malaysia, maka investigasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* dapat dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mohamad-Nor, dkk. (2010) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Hasil dari penelitian Mohamad-Nor, dkk. (2010) menunjukkan bahwa tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 16%. Koefisien determinasi ini mempunyai arti bahwa keseluruhan variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya hanya sebesar 16% sedangkan sisanya sebesar 84% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Selain itu, sebagian besar variabel *corporate governance* yang diteliti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian yang tidak konklusif dan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* hanya 16% diduga karena penelitian tersebut hanya mencakup periode satu tahun, yaitu pada tahun 2002, sehingga tren *audit report lag* dan efek jangka panjang dari tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) terhadap ketepatan waktu laporan audit tidak dapat diperiksa. Alasan pengambilan sampel tahun 2002 dikarenakan pengungkapan tingkat kepatuhan terhadap *The Malaysian Code* tentang tata kelola perusahaan yang baru diterbitkan pada tahun 2000 yang berkaitan dengan dewan konstitusi tersedia pada pertengahan tahun 2001. Penelitian tersebut juga tidak mencakup semua komponen yang mencerminkan kualitas komite audit secara komprehensif karena keterbatasan informasi yang tersedia dalam laporan tahunan.

Dari uraian di atas, maka penelitian yang telah dilakukan oleh Mohamad-Nor, dkk. (2010) perlu dilakukan beberapa perbaikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan-perusahaan yang *go public* di Indonesia. Perbaikan yang dimaksud adalah dengan mempertimbangkan variabel-

variabel lain sebagai prediktor dari *audit report lag* dan juga dengan memperpanjang periode pengamatan.

Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 28 Ayat (2), komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Proporsi komisaris independen harus sedemikian rupa agar memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat, sehingga keterlambatan pelaporan keuangan dapat dihindari.

Menurut Rachmawati (2008), ukuran perusahaan terkait dengan ketepatanwaktuan laporan keuangan tahunan, ukuran perusahaan juga merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan. Besar kecilnya ukuran perusahaan juga dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan tersebut yang tentunya akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik. Selain itu Lianto dan Kusuma (2010) menemukan bahwa profitabilitas dan solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membutuhkan waktu pengauditan laporan keuangan yang lebih cepat karena adanya tuntutan untuk menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada publik. Solvabilitas dapat diukur dengan rasio *total debt to total aset*. Tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan juga akan berpengaruh terhadap lamanya proses audit. Proporsi hutang terhadap total aktiva yang tinggi mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Jika dipandang dari sudut pemberi pinjaman, rasio *total debt to total aset* yang besar memberikan ukuran mengenai tingkat risiko dalam hubungannya dengan ketersediaan nilai aktiva yang dapat dijadikan jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang dilakukan Mohamad-Nor, dkk. (2010) perlu diperbaiki dengan memperpanjang periode pengamatan dan

mempertimbangkan variabel proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas sebagai prediktor dari *audit report lag*.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa penelitian Mohamad-Nor,dkk. (2010) meneliti tentang *audit report lag* hanya sebatas pada aspek *corporate governance* saja dengan obyek penelitian perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, serta memiliki kriteria sampel penelitian yang baik. Meskipun demikian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad-Nor, dkk. (2010) masih belum baik dengan *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran variabel lain perlu dipertimbangkan sebagai prediktor dari *audit report lag* yaitu proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

2. Mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.
3. Mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang auditing.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

###### 1.4.2.1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi perusahaan mengenai pentingnya penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan untuk mengurangi *audit report lag* dan dalam pengambilan keputusan.

###### 1.4.2.2. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi investor, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan investasi mereka pada sebuah perusahaan.

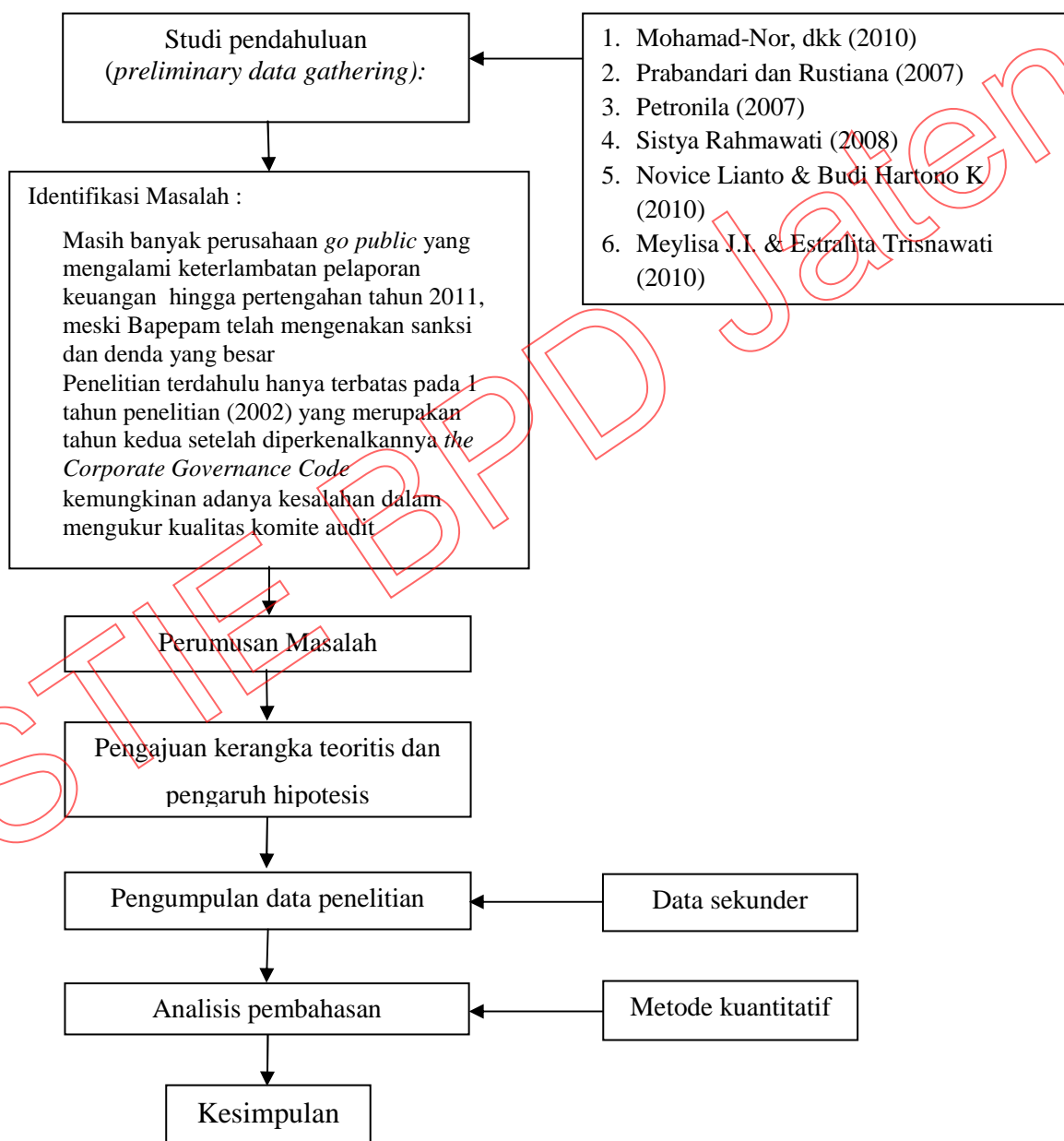
###### 1.4.2.3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang.

## 1.5. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini berisi bagan yang menjelaskan proses atau alur penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi pendahuluan hingga penarikan kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.1 :**  
**Kerangka Penelitian**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang profesor dari Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai '*agents*' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri. Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (kumpulan kontrak).

Secara garis besar, Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dengan pemegang saham, dan hubungan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan lancar, prinsipal akan menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini juga perlu diatur dalam sebuah kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal dalam hal terjadi konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan (Scott, 2000 dalam Siswantaya, 2007).

##### 2.1.1. *Agency Problems*

Teori agensi lebih menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para tenaga profesional (*agents*) yang lebih paham dalam menjalankan bisnis. Agen



bertanggung jawab atas suatu perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sedangkan dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2000) disebutkan bahwa pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen.

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Pemisahan ini akan menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan dan dalam penyeimbangan kepentingan yang tepat. Hal ini juga sering menyebabkan terjadinya konflik harapan atau tujuan di antara pemilik/pemegang saham dan para direksi (*top management*), sedangkan para pemilik justru mengalami kesulitan untuk memverifikasi apa yang sedang dikerjakan oleh pihak manajemen. Konflik tersebut disebabkan adanya asimetri informasi yang dimaknai sebagai ketidakseimbangan distribusi informasi antara agen dan prinsipal. Efek dari asimetri informasi dan pemisahan “kepemilikan” dan “pengelolaan” ini adalah munculnya *agency problems*. Menurut Arrow (1985) dalam Purwati (2006), ada dua macam *agency problems*, yaitu:

1. Moral hazard

Yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal dalam kontrak kerja.

2. Adverse selection

Yaitu keadaan di mana principal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

### 2.1.2. *Agency Cost*

Masalah keagenan (*agency problems*) diatasi oleh pihak pemilik (prinsipal) dengan cara mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya inilah yang menimbulkan *agency costs*, yang menurut teori keagenan harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya.

*Agency costs* mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk '*bonding expenditures*' yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Nasser (2008), ada 3 macam biaya keagenan, yaitu :

1. *Monitoring cost*

Biaya untuk membatasi aktivitas yang dilakukan oleh agen

2. *Bonding cost*

Biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan yang harus dilakukan pemilik kepada manajer, dimana agen membelanjakan sumber daya perusahaan untuk menjamin baha mereka tidak bertindak yang dapat merugikan pemilik perusahaan atau untuk meyakinkan pemilik perusahaan untuk memberi kompensasi jika benar para agen melakukan tindakan tersebut.

3. *Residual cost*

Biaya ini tidak memiliki pengaruh langsung, merupakan akibat berkurangnya kesejahteraan yang seharusnya diterima pemilik perusahaan.

Untuk mengurangi biaya keagenan diperlukan suatu mekanisme agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya pengelolaan suatu perusahaan.

## 2.2. Auditing

Menurut Arrens, dkk (2008:4)

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts)

Auditing adalah proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Menurut Boynton, dkk (2003:6), terdapat tiga tipe audit, yaitu:

1) Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

merupakan audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2) Audit kepatuhan (*compliance audit*)

merupakan audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan ketentuan, atau peraturan tertentu.

3) Audit operasional (*operational audit*)

merupakan audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

PSA No. 02 (IAI,2001:110.1) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Taylor (1997) dalam Christiawan (2002), ada beberapa hal yang menyebabkan laporan keuangan perlu diaudit, diantaranya :

1. konflik yang terjadi karena perbedaan di antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan;
2. informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan;
3. sebuah keahlian sering diperlukan dalam penyusunan dan verifikasi informasi dalam laporan keuangan;
4. pemakai laporan keuangan tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan.

Audit atas laporan keuangan merupakan salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor (Yusuf, 2001:6). Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum.

### **2.3. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan dibuat untuk memberikan gambaran kemajuan (*progress report*) perusahaan secara periodik. Ada beberapa definisi tentang laporan keuangan, antara lain :

1. Zaki Baridwan (2004: 17)

Laporan keuangan merupakan suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun

buku yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu, laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain, yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

2. Kasmir (2008:7)

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

3. Ikatan Akuntansi Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan, 2009:27)

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-cacatan dan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses akuntansi selama tahun buku yang berisi informasi laporan keuangan yang berupa data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan (biasanya dalam laporan tahunan). Menurut Hendriksen (2002:432) ada tiga konsep pengungkapan laporan keuangan yang umumnya diusulkan, yaitu :

1. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*)

Pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*)

Perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan penuh (*full disclosure*)

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan.

Konsep relevansi dan reliabilitas penyajian laporan keuangan menuntut pemenuhan karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan. Karakteristik ini melekat pada informasi keuangan atau akuntansi, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan tersebut. PSAK 60 (2010) menyebutkan karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah : dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Karakteristik relevan di sini memberikan makna bahwa laporan keuangan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan secara tepat waktu. Ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (SFAC dalam Suwardjono, 2005).

#### **2.4. *Audit Report Lag***

Perusahaan dapat memperoleh tambahan dana dengan beberapa cara, diantaranya dengan meminjam kepada kreditur atau menjual saham kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), diantaranya kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara tepat waktu. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi hal yang sangat penting, karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan auditan berguna bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang tepat waktu, auditor memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang mendukung opininya.

Rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen didefinisikan sebagai *audit report lag* (Aryati dan Theresia, 2005 dalam Iskandar dan Trisnawati, 2010). Definisi ini senada dengan Halim (2000) yang mendefinisikan *audit report lag* sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Owusu-Ansah (2000) dalam Petronila (2007) menemukan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik merupakan sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan investor dalam membuat keputusan bisnis.

Menurut Givoly dan Palmon (1992) lamanya audit merupakan “*single most important of the timeliness of earnings announcement*”. Ini mencerminkan bahwa penyajian pengumuman laba yang tepat waktu kepada publik merupakan hal yang sangat penting, sehingga diharapkan perusahaan tidak menunda penyajian laporan keuangannya. Apabila terjadi penundaan akan dapat menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang relevan bagi para penggunanya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Abdullah (1996) dalam Prabandari dan Rustiana (2007) yang menyatakan bahwa

semakin panjang periode antara akhir periode akuntansi dengan waktu publikasi laporan keuangan, semakin tinggi pula kemungkinan informasi dibocorkan pada pihak yang berkepentingan, dan bahkan dapat menimbulkan terjadinya *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham.

Nilai dari informasi laporan keuangan yang diaudit umumnya akan menurun dengan meningkatnya *audit report lag* karena pengguna akan memperoleh informasi keuangan dari sumber-sumber potensial yang lebih mahal lainnya (Knechel dan Payne, 2001 dalam Lee dan Jahng, 2008). *Audit report lag* akan mendorong pemegang saham dan pemegang saham potensial untuk menunda transaksi mereka pada saham atau penjualan mereka saat ini dan pembelian saham baru (Ng dan Tai, 1994 dalam Hashim dan Rahman, 2010). Hal ini pada gilirannya akan memberikan efek negatif bagi perusahaan. *Audit report lag* juga dapat menyebabkan informasi menjadi tidak *up-to-date* sehingga manfaatnya bagi pengguna informasi tersebut menjadi berkurang.

Mengingat pentingnya ketepatan pelaporan keuangan yang telah disampaikan di atas, maka Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan auditor independen kepada Bapepam secara tepat waktu untuk meningkatkan efisiensi pasar. Hal ini diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PMK/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dimana di dalamnya disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai laporan auditor independen dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:

1. neraca;
2. laporan laba rugi;



3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas;
5. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
6. catatan atas laporan keuangan.

Perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, bab XII sanksi administratif pasal 61. Sanksi administratif tersebut berupa :

- a. peringatan tertulis,
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,
- c. pembatasan kegiatan usaha,
- d. pembekuan kegiatan usaha,
- e. pencabutan izin usaha,
- f. pembatalan persetujuan, dan
- g. pembatalan pendaftaran

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, serta dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

*Audit report lag* dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri, profitabilitas, solvabilitas, dan lain-lain, sedangkan faktor eksternal perusahaan meliputi ukuran KAP, *corporate governance*, dan lain-lain.

Menurut Rachmawati (2008) faktor internal dan eksternal perusahaan seperti ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit report lag*. Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2008) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit (*audit delay*) dan penundaan laporan keuangan yang disebabkan oleh karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator. Penelitian yang dilakukan oleh Wooten yang memaparkan teori DeAngelo (1981) dalam Prabandari dan Rustiana (2007) menunjukkan bahwa KAP besar (*the Big Five*) cenderung menyajikan audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil (*non the Big Five*), karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan. Selain itu, KAP besar lebih banyak mengeluarkan pendapat *going concern* daripada KAP kecil (Yuliana dan Ardiati, 2004 dalam Prabandari dan Rustiana, 2007), sehingga dapat menarik klien yang lebih banyak.

Lianto dan Kusuma (2010) menemukan beberapa faktor internal perusahaan yang mempengaruhi *audit report lag*, yaitu profitabilitas dan solvabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membutuhkan waktu pengauditan laporan keuangan yang lebih cepat karena adanya tuntutan untuk menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada publik. Sementara itu, tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih lama. Hal ini dikarenakan proporsi hutang terhadap total aktiva yang tinggi mungkin membuat auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dalam pengauditan terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), sehingga berpengaruh terhadap lamanya proses audit.

Mohamad-Nor, dkk. (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *audit report lag* dan menemukan bahwa ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Potensi masalah dalam proses pelaporan keuangan dapat segera ditemukan dan diselesaikan apabila perusahaan memiliki komite audit yang lebih

besar. Ini bisa terjadi karena komite audit bertugas untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelaporan keuangan. Selain itu, menurut Mohamad-Nor, dkk. (2010) frekuensi pertemuan komite audit yang lebih tinggi dapat mengurangi insiden *restatement* keuangan, maupun kecurangan dalam pelaporan keuangan. Raghunandan, dkk. (1998) dalam Mohamad-Nor, dkk. (2010) berpendapat bahwa komite audit yang lebih sering melakukan pertemuan memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih dalam hal akuntansi dan audit perusahaan.

## 2.5. *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory* dan berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor dan kreditur bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan (Herawaty, 2008). Menurut FCGI (2000), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Istilah *Corporate Governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 2000 dalam FCGI, 2000), misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat, bahkan dalam disiplin ilmu agama. Hal inilah yang menyebabkan beberapa pakar mendefinisikan *Corporate Governance* secara eksplisit berbeda. Adapun definisi *corporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Shann Turnbull (2000) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:

*Corporate governance describes all the the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services.*

2. Achmad Syakhroza (2002) mendefinisikan *Corporate Governance* secara lebih gamblang, mudah dan jelas bahwa:

Corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif – E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF - dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

3. Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah sebagai berikut:

Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

*Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia dalam hal ini kantor kementerian BUMN telah membuat Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang di dalamnya menjabarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*), yaitu :

1. *Transparancy* (Keterbukaan)

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Independence* (Kemandirian)

Yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *corporate governance* menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ;
3. mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
4. meningkatkan iklim investasi nasional;

Menurut FCGI (2000), dalam *Corporate Governance* terdapat tiga komite yang memiliki peranan penting, yaitu komite kompensasi/remunerasi, komite nominasi, dan komite audit. Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. Selain itu, komite audit juga perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (*The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and The Audit Committee* dalam FCGI, 2000).

Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite kompensasi/remunerasi, komite nominasi, dan komite audit diisi oleh anggota komisaris independen. Peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 memberikan persyaratan bahwa jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris agar dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Komite audit dan komisaris independen bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya

terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

#### 2.5.1. Ukuran Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-315/BEJ/06/2000 pada tanggal 1 Juli 2000 yang mengatur tentang pembentukan komite audit dan dewan komisaris. Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *corporate governance*.

Arrens & Loebbecke mendefinisikan Komite Audit sebagai berikut :

*An audit committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management*

*The Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam FCGI (2000) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki komite audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya komite audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya.

Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman



Pelaksanaan Kerja Komite Audit, anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut FCGI (2000), pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Hal ini sesuai dengan prinsip *responsibility*.

3. Pengawasan Perusahaan (*corporate control*).

Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Selain itu, di dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit disebutkan bahwa komite audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite audit juga diwajibkan untuk bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit dalam pelaksanaan wewenangnya.



### 2.5.2. Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris – merupakan inti dari *corporate governance* – yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan – sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen – maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International dalam FCGI, 2000).

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Keberadaan komite-komite bermanfaat dalam pelaksanaan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*governance*) oleh manajemen. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota komisaris independen (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000). Selain itu menurut Mace (1986) dalam Arifin (2005), pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif. Hal ini dikarenakan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dan sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. Namun jika dewan didominasi oleh anggota dari luar (*independent board of director*) maka monitoring dewan komisaris terhadap manajer menjadi efektif seperti ditemukan oleh Weisbach (1988).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang

dimiliki pemegang saham minoritas (bukan pemegang saham pengendali). Hal ini diatur oleh BEJ pada tanggal 1 Juli 2000 melalui Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-315/BEJ/06/2000. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen. Tujuan pengangkatan komisaris independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan ini sesuai dengan prinsip *fairness*. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### 2.5.3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Menurut FCGI (2000), komite audit memainkan peranan penting dalam mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Tanggungjawab komite audit minimal menyangkut proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan lainnya, pengawasan intern, serta dipatuhinya ketentuan tentang undang-undang dan peraturan serta etika bisnis. Dokumen tersebut harus menyatakan bahwa komite audit akan mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus apabila diperlukan. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit wajib menyelenggarakan sejumlah rapat yang memenuhi persyaratan minimum Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya wewenang, tanggung jawab, dan struktur komite audit harus ditetapkan dalam peraturan perusahaan.

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional secara independen kepada dewan komisaris atas laporan atau berbagai hal yang disampaikan oleh dewan direksi. Agar tugas dan fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, komite audit minimal mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Selain itu, rapat yang dilakukan oleh komite audit juga sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (*The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and The Audit Committee* dalam FCGI, 2000). Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit, serta ukuran dari suatu perusahaan.

Rapat dan pertemuan komite audit memiliki peranan penting bagi sebuah perusahaan, sehingga harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Komite audit diharuskan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam pertemuan komite audit, masalah yang dihadapi dalam proses pelaporan keuangan diidentifikasi, tetapi jika frekuensi pertemuan rendah, masalah tidak dapat diperbaiki dan diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, dengan diadakannya rapat komite audit yang rutin akan dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan.

## **2.6. Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, modal, rata-rata total penjualan, rata-rata total aset, jumlah karyawan, dan lain-lain. Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Daniati dan Suhairi, 2006).

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan (Mas'ud Machfoedz, 1994 dalam Yuliyanti, 2011). Kategori ukuran perusahaan yaitu:

1. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar

3. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 mendefinisikan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) sebagai badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivasnya diatas seratus milyar.

Menurut Prabandari dan Rustiana (2007), ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka akan melaporkan semakin cepat karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber informasi (Lianto dan Kusuma, 2010). Dyer dan McHugh (1975) dalam Rachmawati (2008) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit (*audit delay*) dan penundaan

laporan keuangan yang disebabkan oleh karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh para investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator. Di samping itu ukuran perusahaan juga memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar biaya audit (*audit fees*), hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki audit delay dan timeliness yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil.

Givoly dan Palmon (1982) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset terhadap *audit report lag*. Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) juga melakukan penelitian mengenai *audit report lag* pada perusahaan-perusahaan publik di New Zealand. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang signifikan berpengaruh adalah ukuran perusahaan. Semakin besar aset perusahaan maka semakin pendek *audit delay*.

## 2.7. Profitabilitas

Menurut Lianto dan Kusuma (2010), profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ini sejalan dengan Petronila (2007) yang menyatakan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasinya. Perusahaan akan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik dari tingkat penjualan, asset, modal maupun saham tertentu. Rasio profitabilitas menunjukkan sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. *Net income* suatu perusahaan akan mengindikasikan "berita baik" atau "berita buruk" selama tahun berjalan, sehingga sering digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan.

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *profitability ratio* seperti GPM (*Gross Profit Margin*), NPM (*Net Profit Margin*), Earning Power of Total

investment, ROI (*Return On Investment*), dan ROE (*Return On Equity*) (Van-Horne dan Wachowicz, JR., 2005:222).

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan bersih}}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan.

Rasio ini dapat dihitung dengan Rumus yaitu :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

3. *Return on Investment* (Pengembalian atas Investasi)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.

Rasio ini dikenal pula dengan tingkat pengembalian atas aktiva (ROA)

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

4. *Return on Equity* (Pengembalian atas Ekuitas)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas pemegang saham}}$$

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Prabandari dan Rustiana (2007), apabila perusahaan rugi maka perusahaan akan meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari biasanya sehingga menunda untuk mengumumkan "bad news" kepada publik. Auditor akan bertindak lebih berhati-hati dan cermat selama proses audit dalam memberikan jawaban apakah peningkatan kerugian yang dialami oleh perusahaan diakibatkan oleh kegagalan atau disebabkan oleh kecurangan manajemen. Sementara pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung mengharapkan penyelesaian audit secepat mungkin sehingga mampu mengumumkan laporan keuangan audit ke publik lebih awal.

Na'im (1998) dalam Prabandari dan Rustiana (2007) juga menyebutkan bahwa tingkat profitabilitas yang rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. Wirakusuma (2004) dalam Prabandari dan Rustiana (2007) mengutip temuan Dye dan Sridhar (1995) bahwa perusahaan yang memiliki *good news* akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang operasionalnya gagal (*bad news*).

## **2.8. Solvabilitas**

Menurut Lianto dan Kusuma (2010), solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. Analisa solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Solvabilitas juga mengindikasikan jumlah modal yang dikeluarkan oleh investor dalam rangka menghasilkan laba (Rachmawati, 2008).

Rasio solvabilitas disebut juga rasio leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk dapat menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam (Van-Horne dan Wachowicz, JR., 2005:208). Adapun rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah :

1. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

Merupakan perbandingan antara utang – utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya .

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Ekuitas pemegang saham}}$$

2. *Debt to Total Asset Ratio* ( Rasio Utang terhadap Total Aktiva )

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Ahmad dan Kamarudin (2003) dalam Iskandar dan Trisnawati (2010) berpendapat bahwa *debt proportion* mungkin mengindikasikan kesehatan finansial sebuah perusahaan. *Debt proportion* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Sebagai contoh, kesehatan perusahaan yang rendah akan meningkatkan kemungkinan terjadinya *mismanagement* dan *fraud*, serta ketidaksengajaan untuk mengurangi karyawan. Sebagai konsekuensinya, auditor akan meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit karena laporan keuangan dinilai kurang *reliable*.

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rachmawati (2008) menyatakan bahwa pengauditan hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengauditan modal. Biasanya mengaudit hutang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan dengan mengaudit modal. *Debt proportion* secara normal berhubungan dengan tingginya risiko. *Debt proportion* yang tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Biasanya perusahaan akan mengurangi resiko dengan menunda publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Ini akan



memberikan sinyal ke pasar bahwa perusahaan dalam tingkat resiko yang tinggi, sehingga auditor harus mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama. *Debt proportion* juga akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam pengauditan (Rachmawati, 2008).

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Klein (2002) dalam Siregar (2006) menemukan bahwa besaran akrual diskresional lebih tinggi untuk perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen dibandingkan perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri dari banyak komisaris independen. Tuntutan yang dihadapi perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, *reliable* dan tepat waktu juga semakin menekankan pentingnya keberadaan komite audit. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit sangat penting untuk mengurangi tekanan manajemen terhadap auditor dalam memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian, sehingga dapat dihasilkan laporan audit yang bersih dan *up to date*.

Bursa Efek Indonesia mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menunjuk komite audit dari direksinya dan harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000. Potensi masalah dalam proses pelaporan keuangan lebih mungkin ditemukan dan diselesaikan oleh komite audit yang memiliki ukuran lebih besar. Ini bisa terjadi jika perusahaan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk komite audit dan meningkatkan kualitas pengawasan. Peningkatan pengawasan ini akan mengurangi kecurangan dalam

pelaporan keuangan, sehingga *audit report lag* dapat dikurangi. Li, Pike dan Haniffa (2008) dan Persons (2009) dalam Mohamad-Nor, dkk (2010) juga menunjukkan bahwa ukuran komite audit mempengaruhi pengungkapan perusahaan.

Selain itu, untuk dapat melihat pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag* secara lebih pasti diperlukan kehadiran beberapa variabel kontrol, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Perusahaan yang memiliki ukuran berbeda akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula. Menurut Rachmawati (2008), perusahaan besar memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar biaya audit (*audit fees*), hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki *audit delay* dan *timeliness* yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih kecil.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan solvabilitas yang berbeda juga dapat mempengaruhi besarnya pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag*. Menurut Lianto dan Kusuma (2010), perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membutuhkan waktu pengauditan laporan keuangan yang lebih cepat karena adanya tuntutan untuk menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada publik. Selain itu, rasio *total debt to total asset* yang besar memberikan ukuran mengenai tingkat risiko dalam hubungannya dengan ketersediaan nilai aktiva yang dapat dijadikan jaminan.

Dari uraian di atas, maka variabel ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, dan tingkat solvabilitas perlu dikendalikan agar pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag* dapat diketahui secara lebih pasti dan hasil penelitian menjadi lebih mudah disimpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diusulkan adalah :

H1 : Diduga ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

## 2.9.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag* dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas

Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dan sedangkan integritas pelaporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan. Tujuan diangkatnya komisaris independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini disyaratkan jumlah minimal komisaris independen adalah 30 % dari seluruh dewan komisaris. Komisaris independen harus berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak luar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan, mengurangi kemungkinan penipuan laporan keuangan, meningkatkan kinerja perusahaan, dan mengurangi *audit report lag*.

Meskipun secara teori, besarnya proporsi komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*, tetapi hal ini belum dapat diketahui secara pasti jika karakteristik yang dimiliki oleh tiap perusahaan berbeda. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *audit report lag* akan berbeda pada perusahaan besar, menengah, dan kecil. Menurut Petronila (2007), perusahaan besar cenderung memiliki pengendalian internal yang lebih baik, yang membantu auditor dalam melakukan proses audit sehingga auditor memiliki waktu yang lebih sedikit dalam proses audit.

Besarnya pengaruh proporsi komite audit dan *audit report lag* juga akan berbeda pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan solvabilitas yang berbeda. Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010), perusahaan yang menderita kerugian akan meminta auditornya untuk menjadwalkan kembali pengauditan

lebih lambat dari biasanya sehingga menunda untuk mengumumkan *bad news* kepada publik. Auditor juga cenderung berhati-hati dalam prosedur-prosedur audit yang dapat memastikan nilai kerugian sehingga dengan demikian proses audit akan lebih panjang. Menurut Lee dan Jahng (2008), perusahaan yang memiliki rasio *total debt to assets* dan resiko yang tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam penyelesaian audit mereka.

Dari uraian di atas, maka variabel ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, dan tingkat solvabilitas perlu dikendalikan agar pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *audit report lag* dapat diketahui secara lebih pasti dan hasil penelitian menjadi lebih mudah disimpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diusulkan adalah :

H2 : Diduga proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

### 2.9.3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan yang rutin. Pertemuan Komite audit menjadi tempat bagi direksi untuk membahas dan memantau proses pelaporan keuangan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas, terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite. Penelitian Li et al. (2008) dan Xie, Davidson dan Dadalt (2003), Li et al. (2008) dalam Mohamad-Nor, dkk (2010) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit secara positif berhubungan dengan tingkat pengungkapan perusahaan.

Frekuensi pertemuan komite audit yang lebih tinggi juga secara signifikan terkait dengan insiden yang lebih rendah atas penyajian kembali laporan

keuangan, atau kecurangan pelaporan keuangan. Masalah yang dihadapi dalam proses pelaporan keuangan diidentifikasi di dalam rapat komite audit, tetapi jika frekuensi pertemuan rendah masalah tidak dapat diperbaiki dan diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan demikian diperkirakan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki frekuensi pertemuan komite audit yang lebih tinggi akan memiliki *lag* audit yang lebih pendek.

Pengaruh frekuensi pertemuan komite audit dalam mengurangi *audit report lag* belum dapat diketahui secara pasti apabila karakteristik yang dimiliki oleh tiap perusahaan berbeda. Pada perusahaan besar, besarnya pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* akan berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan kecil dan menengah.

Menurut Prabandari dan Rustiana (2007), perusahaan besar dianggap mempunyai sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Ini dapat juga memudahkan auditor dalam melaksanakan pengauditan laporan keuangan dan perusahaan yang cenderung mendapatkan tekanan dari pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha untuk mempublikasikan laporan audit dan laporan keuangan lebih tepat waktu.

Perbedaan pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* juga dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan solvabilitas yang berbeda. Perusahaan-perusahaan yang mengumumkan rugi cenderung akan menunda untuk mengumumkan “*bad news*” kepada publik. Auditor juga akan bertindak hati-hati selama proses audit dalam memberikan jawaban apakah peningkatan kerugian yang dialami oleh perusahaan diakibatkan oleh kegagalan manajemen (Prabandari dan Rustiana, 2007). Selain itu, perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung dapat melakukan *mismanagement* dan *fraud*. Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap total aset ini, akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), yang pada akhirnya memerlukan kecermatan yang lebih dalam pengauditan (Rachmawati, 2008).

Dari uraian di atas, maka variabel ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, dan tingkat solvabilitas perlu dikendalikan agar pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* dapat diketahui secara lebih pasti dan hasil penelitian menjadi lebih mudah disimpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diusulkan adalah :

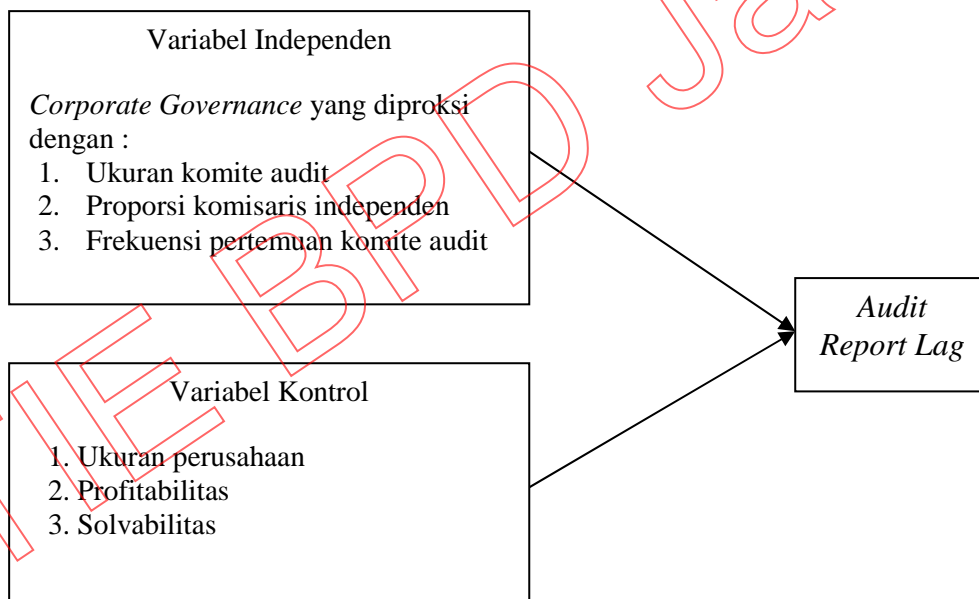
H3 : Diduga frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

STIE BPD Jateng

## 2.10. Model Penelitian

Berdasarkan uraian hubungan antar variabel dan hipotesis yang diajukan, peneliti akan menyajikan model penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Adapun variabel independen yang digunakan adalah ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, dan frekuensi pertemuan komite audit, sedangkan variabel kontrol yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas. Penelitian ini dapat digambarkan dengan model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.1.**  
**Model Penelitian**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi menurut para pakar yang telah dituangkan dalam buku-buku teks. Konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian ini berkaitan dengan definisi variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini, diantaranya

##### 3.1.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang besarnya tergantung dari besaran variabel independen (bebas). Variabel dependen yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah *audit report lag*.

Aryati dan Theresia (2005) dalam Iskandar dan Trisnawati, 2010 mendefinisikan *audit report lag* sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

##### 3.1.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang merupakan penyebab atau yang mempengaruhi variabel dependen (Y).

Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini merupakan proksi dari *corporate governance*, yaitu :

##### 3.1.2.1. Ukuran Komite Audit ( $X_1$ )

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja



Komite Audit, komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### 3.1.2.2. Proporsi Komisaris Independen ( $X_2$ )

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mendefinisikan Komisaris independen sebagai anggota komisaris yang :

1. berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

#### 3.1.2.3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit ( $X_3$ )

Menurut Mohamad-Nor, dkk (2010), "*The audit committee meeting is the place for directors to discuss the financial reporting process and it is where the process of monitoring financial reporting occurs*".

#### 3.1.3. Variabel Kontrol ( $Z$ )

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dengan adanya variabel kontrol, pengaruh variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi variabel dependen akan terputus dan analisis akan memiliki kekuatan statistik (*power*) yang lebih tinggi. Cara mengontrol dalam penelitian adalah kontrol secara statistik yang dilakukan melalui analisis statistik.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.1.3.1. Ukuran Perusahaan ( $Z_1$ )

Menurut Prabandari dan Rustiana (2007), Ukuran perusahaan merupakan fungsi dari kecepatan pelaporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan maka akan melaporkan semakin cepat karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber informasi.

#### 3.1.3.2. Profitabilitas ( $Z_2$ )

Menurut Lianto dan Kusuma (2010), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan asset yang ada untuk menghasilkan pendapatan dan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

#### 3.1.3.3. Solvabilitas ( $Z_3$ )

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi (Lianto dan Kusuma, 2010).

### 3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep atau teori yang dapat diukur (*measureable*) atau diamati (*observable*).

#### 3.2.1. *Audit Report Lag* (Y)

*Audit report lag* diukur dengan menghitung rentang waktu atau jumlah hari dari akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit.

$$\text{Audit report lag} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

#### 3.2.2. Ukuran Komite Audit ( $X_1$ )

Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.

Ukuran komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota di dalam komite audit.

### 3.2.3. Proporsi Komisaris Independen ( $X_2$ )

Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mengeluarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Kep-315/BEJ/06/2000 pada tanggal 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan komite audit dan dewan komisaris. Di dalamnya dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*) dan persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Variabel proporsi komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan persentase komisaris independen dalam Dewan Komisaris.

### 3.2.4. Frekuensi Pertemuan Komite Audit ( $X_3$ )

FCGI (2001) menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan sekali atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Variabel frekuensi pertemuan komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah pertemuan komite audit dalam satu tahun.

### 3.2.5. Ukuran Perusahaan ( $Z_1$ )

Pengukuran terhadap ukuran perusahaan diproksikan dengan *natural log of total assets* (Mohamad-Nor, dkk., 2010). Penggunaan *natural log* dimaksudkan untuk menyederhanakan besarnya total aset dan menyamakan ukuran saat regresi.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total aset (dalam jutaan rupiah)})$$

### 3.2.6. Profitabilitas ( $Z_2$ )

Variabel ini diproksi melalui *return on assets*, yang diukur dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva (Wirakusuma, 2004 dalam Lianto dan Kusuma, 2010).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih (dalam jutaan rupiah)}}{\text{Total Aktiva (dalam jutaan rupiah)}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan tingkat asset tertentu. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik dan semakin besar kemampuan untuk menghasilkan laba dari sumber daya (*asset*) yang dimiliki. Menurut Van Horne dan Wachowicz, JR. (2005), rasio ini sebaiknya berada di atas rasio median industrinya.

### 3.2.7. Solvabilitas ( $Z_3$ )

Variabel ini diproksi melalui rasio *total debt to total assets* yang diukur dari total kewajiban dibagi dengan total aktiva (Wirakusuma, 2004 dalam Lianto dan Kusuma, 2010).

$$\text{Total Debt to Total Assets} = \frac{\text{Total Kewajiban (dalam jutaan rupiah)}}{\text{Total Aktiva (dalam jutaan rupiah)}} \times 100\%$$

Menurut Van Horne dan Wachowicz, JR. (2005), rasio ini sebaiknya berada di bawah nilai median industrinya. Semakin tinggi proporsi *total debt to total assets ratio* akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya.

## 3.3. Populasi dan Sampel

### 3.3.1. Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdapat dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Sektor manufaktur dipilih untuk menghindari adanya *industrial effect* yaitu risiko industri yang berbeda antara suatu sektor industri yang satu dengan yang lain. Selain itu, sektor manufaktur dominan di Asia, khususnya di Indonesia (Achmad dkk., 2009).

### 3.3.2. Sampel

Sampel merupakan subkelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran, 2006). Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau sampling pertimbangan, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari kelompok sasaran spesifik. Perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang berasal dari kelompok manufaktur dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode pengamatan 2008-2010 dengan mata uang rupiah.
3. Perusahaan yang mengungkapkan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dalam laporan tahunan, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit.
4. Perusahaan yang menerbitkan laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan perusahaannya.
5. Perusahaan yang tidak melakukan transaksi *merger* dan akuisisi selama periode pengamatan 2008 – 2010.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi (laporan auditor, laporan keuangan, dan laporan tahunan) di Bursa Efek Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2006:60), data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk literatur, karya ilmiah orang lain, atau data internet. Data sekunder yang digunakan berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan auditor independen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan pojok Bursa Efek Indonesia Undip. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan literatur dan publikasi yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif.

#### 3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2009). Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data penelitian berupa variabel - variabel penelitian yang meliputi ukuran komite audit, proporsi komisaris independen, dan frekuensi pertemuan komite audit.

#### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2009:147). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik (*P-P Plot*). Apabila *P-P Plot* memiliki titik-titik yang berada di sekitar garis lurus, maka dapat diasumsikan bahwa data memiliki distribusi populasi yang normal, sedangkan jika terjadi sebaliknya maka data memiliki distribusi tidak normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu, di samping analisis grafik, dilakukan pula analisis statistik untuk mengetahui distribus data suatu penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah uji *Kolmogorof Smirnov*.

Perumusan hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

$H_0$  : data residual berdistribusi normal

$H_a$  : data residual tidak berdistribusi normal

Kriteria keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut :

Jika  $\text{sig.} \leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

Jika  $\text{sig.} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2009: 95). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Perumusan hipotesis untuk uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada multikolinieritas

$H_a$  : ada multikolinieritas

Metode untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *variance inflammatory factor (VIF)*.

Kriteria keputusan uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Jika  $VIF > 10$  atau  $Tolerance < 0,1$ , maka  $H_0$  diterima, tidak ada multikolinieritas.

Jika  $VIF \leq 10$  atau  $Tolerance \geq 0,1$ , maka  $H_0$  ditolak, ada multikolinieritas.

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2009:125), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan *scatter plot* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan analisis grafik plot, dilakukan pula uji statistik untuk lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser.

Hipotesis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

$H_0$  : tidak ada heteroskedastisitas

$H_a$  : ada heteroskedastisitas

Kriteria keputusan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Jika  $\text{sig.} \leq 0,05$ ,  $H_0$  ditolak, varians error homogen (ada heteroskedastisitas)

Jika  $\text{sig.} > 0,05$ ,  $H_0$  diterima, varians error homogen (tidak ada heteroskedastisitas)

### 3.5.3 Regresi Linear Berganda

Menurut Sekaran (2006:299) analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ARL} = \beta_0 + \beta_1 \text{ACSIZE} + \beta_2 \text{IND\_COMM} + \beta_3 \text{ACMEET} + \beta_4 \text{FIRM\_SIZE} + \beta_5 \text{PROF} + \beta_6 \text{SOLV} + \varepsilon$$

dimana :

ARL = *audit report lag*,

ACSIZE = ukuran komite audit, jumlah seluruh anggota komite audit



IND\_COMM = persentase komisaris independen dalam dewan komisaris

ACMEET = jumlah pertemuan komite audit selama satu tahun. Nilai 1 (satu) jika mengadakan pertemuan minimal empat kali, dan 0 (nol) jika mengadakan pertemuan kurang dari empat kali dalam satu tahun.

FIRM\_SIZE = ukuran perusahaan, diukur dengan *natural log of total assets*

PROF = profitabilitas, diproksikan dengan menggunakan ROA

SOLV = solvabilitas, diproksikan dengan *total debt to total asset ratio*

#### 3.5.4 Analisis kelayakan model regresi (*Goodness of Fit*)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2009:87)

##### 3.5.4.1 Ukuran Kelayakan Model Regresi

Menurut Ghozali (2009:87), koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted  $R^2$  bernilai negatif, maka nilai adjusted  $R^2$  dianggap bernilai nol.

##### 3.5.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2009:88).

Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini.

Rumusan hipotesis statistik pada pengujian ini adalah :

$H_0$  : semua  $\beta$  berharga 0

Artinya, semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

$H_a$  : tidak semua  $\beta$  berharga 0

Artinya, semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Apabila taraf signifikansi observasi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya semua variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila taraf signifikansi observasi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya semua variabel independen secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.5.5 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009:88).

Pengujian secara parsial/individu ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini.

Rumusan hipotesis statistik pada pengujian ini adalah :

$H_{01} : \beta_1 = 0$ , artinya ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

$H_{a1} : \beta_1 < 0$ , artinya ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

$H_{02} : \beta_2 = 0$ , artinya proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

$H_{a2} : \beta_2 < 0$ , artinya proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

$H_{03} : \beta_3 = 0$ , artinya frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

$H_{a3} : \beta_3 < 0$ , artinya frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Apabila taraf signifikansi observasi  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya semua variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila taraf signifikansi observasi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya semua variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 151 perusahaan, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 perusahaan. Jumlah tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Proses penentuan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1.**  
**Proses Penentuan Sampel**

Kriteria	Jumlah
a. Perusahaan yang berasal dari kelompok manufaktur dan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 – 2010	151
b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode pengamatan 2008-2010 dengan mata uang rupiah	41
c. Perusahaan yang mengungkapkan Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan secara lengkap	29
d. Perusahaan yang menerbitkan laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan perusahaannya	29
e. Perusahaan yang tidak melakukan transaksi <i>merger</i> dan akuisisi selama periode pengamatan 2008-2010	22

Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	22
--	----

Sumber : Laporan Tahunan 2008-2010, *Indonesia Stock Exchange (IDX)*  
2008 -2010, diolah

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut didominasi oleh jenis *Automotive and Allied Products* yang berjumlah enam perusahaan, jenis *Food and Beverages* berjumlah tiga perusahaan, sedangkan sisanya berasal dari jenis perusahaan *Cements, Chemical and Allied Products, Metal and Allied Products, Pharmaceuticals, Electronic and Office Equipment, Tobacco Manufacturers, Cables, Photographic Equipment, dan Plastics and Glass products.*

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT AKR Corporindo (AKRA)

PT AKR Corporindo secara resmi didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya (AKR). Pada tanggal 3 Oktober 1994 seluruh saham Perseroan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada 2004 nama Perseroan diubah dari PT Aneka Kimia Raya Tbk menjadi PT AKR Corporindo Tbk dengan kode saham "AKRA". Lama *lag* audit PT AKR Corporindo relatif sama. Pada tahun 2008 adalah 84 hari, selanjutnya tahun 2009 sedikit mengalami penurunan menjadi 70 hari, dan pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 84 hari.

2. PT Astra-Graphia (ASGR)

Astragraphia mengawali perjalanan bisnis pada tahun 1971 sebagai Divisi Xerox di PT Astra Internasional yang kemudian dipisahkan menjadi badan hukum sendiri pada tahun 1975. Tahun 1989 Astragraphia mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ASGR". Lama *lag* audit PT Astra-Graphia mengalami sedikit penurunan, yaitu pada tahun 2008 adalah 51 hari, kemudian tahun 2009 menurun menjadi 50 hari, dan tahun 2010 menjadi 49 hari.

3. PT Astra International Tbk (ASII)

Astra berdiri pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan. Sejak tahun 1990 Perseroan menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ASII". Lama *lag* audit PT Astra International Tbk relatif sama, yaitu sekitar 55 sampai dengan 57 hari.

4. PT Astra Otoparts (AUTO)

Astra Otoparts berdiri pada tahun 1976 sebagai perusahaan perdagangan di sektor industri otomotif, perakitan mesin dan konstruksi dengan nama PT Alfa Delta Motor. Pada tahun 1998, Astra Otoparts menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "AUTO". Lama *lag* audit relatif sama, yaitu  $\pm$  50 hari.

5. PT Budi Acid Jaya (BUDI)

PT Budi Acid Jaya didirikan pada tahun 1979. Setelah melalui perencanaan yang matang, maka pada tahun 1995 perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham perusahaan kepada publik. Lama *lag* audit PT Budi Acid Jaya relatif sama, yaitu sekitar 82 sampai dengan 84 hari.

6. PT Dynaplast Tbk (DYNA)

PT Dynaplast Tbk memperdagangkan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus 1991 dengan kode saham "DYNA". Selanjutnya pada tahun 1994 dan 1997, perusahaan melakukan penawaran umum terbatas pertama dan kedua kepada para pemegang saham. Lama *lag* audit perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu pada tahun 2008 adalah 86 hari, kemudian tahun 2009 menurun menjadi 81 hari, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga menjadi 47 hari.

7. PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL)

PT Gajah Tunggal Tbk didirikan pada tahun 1951. Pada tahun 1990, PT Gajah Tunggal Tbk mendaftarkan saham perusahaannya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "GJTL". Lama *lag* audit perusahaan tidaklah sama, *lag* audit terendah terjadi pada tahun 2009 dengan lama 76 hari, sedangkan *lag* audit tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan lama 86 hari.

8. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP)

Pada tahun 1913, Liem Seeng Tee, seorang imigran asal Cina, memulai bisnisnya dengan membuat dan menjual rokok kretek luring tangan di rumahnya di Surabaya, Indonesia. Pada awal tahun 1930-an, Liem Seeng Tee mengganti nama keluarga sekaligus nama perusahaannya menjadi Sampoerna. Sampoerna berkembang pesat dan mencatatkan sahamnya pada tahun 1990 dengan kode saham "HMSP". Lama *lag* audit tidaklah sama, *lag* audit tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan lama 83 hari, sedangkan *lag* audit terendah terjadi pada tahun 2010 dengan lama 75 hari.

9. PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk (INTP)

PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk didirikan pada tahun 1985 dan *listing* di BEI pada tahun 1989 dengan kode saham "INTP". Lama *lag* audit mengalami penurunan meski tidak signifikan. Pada tahun 2008, lama *lag* audit adalah 63 hari, selanjutnya pada tahun 2009 berkurang menjadi 62 hari, dan pada tahun 2010 kembali berkurang menjadi 59 hari.

10. PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM)

PT Kabelindo Murni Tbk didirikan pada tahun 1972 dengan nama PT Kabel Indonesia (Kabelindo) sebagai perusahaan PMA yang juga merupakan salah satu produsen kabel pertama di Indonesia. Pada tahun 1979, kepemilikan perusahaan berubah status menjadi Perusahaan PMDN serta berubah nama. Perseroan menjadi perusahaan publik dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1992 dengan kode saham "KBLM". Lama *lag* audit PT Kabelindo Murni relatif sama, yaitu berkisar antara 84 sampai dengan 85 hari.

11. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)

PT Kalbe Farma Tbk ("Perseroan" atau "Kalbe") berdiri sejak tahun 1966. Pada tahun 1991 terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik dengan kode saham "KLBF". Lama *lag* audit PT Kalbe Farma Tbk mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2008 dengan lama 75 hari, kemudian tahun 2009 berkurang menjadi 70 hari, dan pada tahun 2010 berkurang lagi menjadi 67 hari.

12. PT Lion Metal Works Tbk (LION)

PT Lion Metal Works Tbk didirikan pada tanggal 16 Agustus 1972 di Jakarta dalam rangka Penanaman Modal Asing yang merupakan kerjasama antara pengusaha Indonesia, perusahaan Singapura dan Malaysia. Pada tahun 1993, PT Lion Metal Works Tbk *listing* di BEI dengan kode saham “LION”. Lama *lag* audit PT Lion Metal Works Tbk mengalami penurunan hingga 6 hari. Pada tahun 2008, *lag* audit perusahaan adalah 75 hari, kemudian tahun 2009 berkurang menjadi 69 hari, dan pada tahun 2010 sedikit bertambah menjadi 70 hari.

13. PT Modern Internasional Tbk (MDRN)

Pada tahun 1971 didirikan dengan nama PT Modern Photo Film Company. Selanjutnya pada tahun 1991 Penawaran Umum Perdana Saham dan secara resmi terdaftar di BEI dengan kode saham “MDRN”. Pada tahun 2007, perusahaan berubah nama menjadi PT Modern Internasional Tbk. Lama *lag* audit mengalami penurunan yang signifikan, yaitu pada tahun 2008 adalah 128 hari, kemudian pada tahun 2009 berkurang menjadi 81 hari, dan pada tahun 2010 sedikit bertambah menjadi 84 hari.

14. PT Merck Tbk (MERK)

PT Merck Tbk didirikan pada tanggal 14 Oktober 1970 sebagai bagian dari perusahaan farmasi dan bahan kimia berskala global, Merck KGaA, yang telah berdiri sejak 1668. Perusahaan telah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) sejak tahun 1981 dengan kode saham “MERK”. Lama *lag* audit mengalami peningkatan, yang semula pada tahun 2008 adalah 50 hari, kemudian pada tahun 2009 dan 2010 bertambah menjadi 54 hari.

15. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)

PT Multi Bintang Indonesia Tbk awalnya didirikan di Medan pada tahun 1929 dengan nama Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen. Setelah beberapa kali berubah nama, Perseroan memakai nama baru, PT Multi Bintang Indonesia dan *listing* di BEI pada tahun 1981 dengan kode saham “MLBI”. Lama *lag* audit perusahaan mengalami penurunan, yang semula pada tahun 2008 adalah 69 hari,



kemudian pada tahun 2009 berkurang menjadi 62 hari, dan tahun 2010 berkurang lagi menjadi 61 hari.

16. PT Sierad Produce Tbk (SIPD)

Sierad Produce dahulu bernama PT Betara Darma Export Import yang berdiri pada tanggal 6 September 1985. Nama Sierad Produce mulai digunakan pada tanggal 27 Desember 1996 saat persiapan untuk *public listing* di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Pada tahun 2001, PT Sierad Produce Tbk bergabung dengan 3 perusahaan lain yang juga berada di bawah naungan Sierad Group, yaitu PT Anwar Sierad Tbk, PT Sierad Feedmill, dan PT Sierad Grains. Lama *lag* audit PT Sierad Produce Tbk tidaklah sama, *lag* audit tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu 98 hari. Lama *lag* audit ini melebihi batas ketentuan Bapepam yang hanya 90 hari. Sedangkan *lag* audit terendah terjadi pada tahun 2008 dengan lama 79 hari.

17. PT SMART Tbk (SMAR)

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“SMART” atau “Perseroan”) didirikan tahun 1962 dan saat ini menjadi salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 1992, PT SMART Tbk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “SMAR”. Lama *lag* audit PT SMART Tbk relatif sama, yaitu sekitar 40 hari.

18. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB)

PT Holcim Indonesia Tbk didirikan pada tahun 15 Juni 1971 dengan nama PT Semen Tjibinong. Pada tahun 1977, PT Semen Tjibinong mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “SMCB”. PT Semen Tjibinong resmi berganti nama menjadi PT Holcim Indonesia pada tahun 2006. Lama *lag* audit PT Holcim Indonesia cenderung mengalami penurunan selama periode pengamatan 2008-2010. Pada tahun 2008, lama *lag* audit perusahaan adalah 40 hari, selanjutnya pada tahun 2009 berkurang menjadi 33 hari, dan tahun 2010 berkurang lagi menjadi 31 hari.

19. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

PT Selamat Sempurna Tbk. (“Perseroan”) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976. Pada tahun 1996, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode saham “SMSM”. Lama *lag* audit perusahaan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami peningkatan. Lama *lag* audit tahun 2008 adalah 70 hari, selanjutnya pada tahun 2009 bertambah menjadi 76 hari, dan tahun 2010 bertambah lagi menjadi 80 hari.

20. PT Tira Austenite Tbk (TIRA)

Berawal sebagai Divisi Teknik di PT. Tigaraksa di tahun 1971, PT. Tira Austenite Tbk didirikan pada tanggal 8 April 1974 dengan aktivitas bisnis sebagai perusahaan perdagangan yang berfokus sebagai distributor, perwakilan, dan agen tunggal berlisensi untuk produk-produk teknik permesinan berkualitas tinggi dari Eropa. Pada bulan juli 1993, PT. Tira Austenite Tbk menjadi perusahaan publik yang sahamnya terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “TIRA”. Lama *lag* audit PT Tira Austenite Tbk tidaklah sama. *Lag* audit terpanjang terjadi pada tahun 2008, yaitu 84 hari, dan *lag* audit terpendek terjadi pada tahun 2009 dengan lama 76 hari.

21. PT Tunas Ridean Tbk (TURI)

PT Tunas Ridean Tbk berdiri pada tahun 1967 sebagai perusahaan keluarga dengan nama Tunas Indonesia Motor yang bergerak di bidang importir dan penyalur resmi Mercedes-Benz, Fiat dan Holden. Pada tahun 1980, Grup mengintegrasikan seluruh bisnis unit ke dalam satu perusahaan induk PT Tunas Ridean Tbk. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995 dengan kode saham “TURI”. Lama *lag* audit PT Tunas Ridean Tbk relatif sama, yaitu sekitar 89 hari.

22. PT United Tractor Tbk (UNTR)

United Tractors (UT/Perseroan) didirikan pada 13 Oktober 1972 sebagai distributor tunggal alat berat Komatsu di Indonesia. Pada 19 September 1989, Perseroan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek

Surabaya, dengan kode perdagangan “UNTR”, dimana PT Astra International Tbk menjadi pemegang saham mayoritas. Lama *lag* audit PT United Tractor Tbk tidaklah sama. *Lag* audit terpanjang terjadi pada tahun 2010, yaitu 55 hari, dan *lag* audit terpendek terjadi pada tahun 2009 dengan lama 50 hari.

#### 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis deskripsi bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data dalam variabel yang dilihat dari rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2009). Statistik deskriptif merupakan statistik untuk mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, yaitu ARL (*audit report lag*), ACSIZE (ukuran komite audit), INDCOM (proporsi komisaris independen), ACMEET (frekuensi pertemuan komite audit), FSIZE (ukuran perusahaan), ROA (profitabilitas), dan TDTA (solvabilitas). Dalam penelitian ini deskripsi variabel meliputi rata-rata (*mean*), nilai terendah, nilai tertinggi, dan standar deviasi.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACSIZE	66	2.00	4.00	3.1061	.35643
INDCOM	66	.25	.67	.3908	.08319
ACMEET	66	2.00	14.00	5.8636	2.83324
FSIZE	66	12.21	18.54	14.8658	1.56294
ROA	66	-.07	.39	.1159	.09649
TDTA	66	.00	.89	.4359	.20149
ARL	66	31.00	128.00	68.9394	18.52224
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

##### 1. *Audit Report Lag*

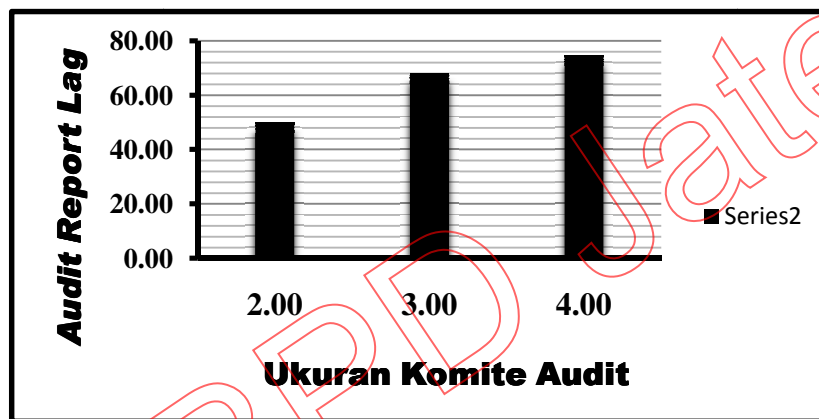
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, *audit report lag* (ARL) terendah (*minimum*) adalah 31 hari

sedangkan *audit report lag* (ARL) tertinggi (*maximum*) adalah 128 hari. Rata-rata (*mean*) *audit report lag* (ARL) dari 66 sampel adalah 68,9394 dengan standar deviasi sebesar 18,52224. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

2. Ukuran Komite Audit

**Gambar 4.1**  
**Grafik Bivariate**

**Ukuran Komite Audit dan *Audit Report Lag***



Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

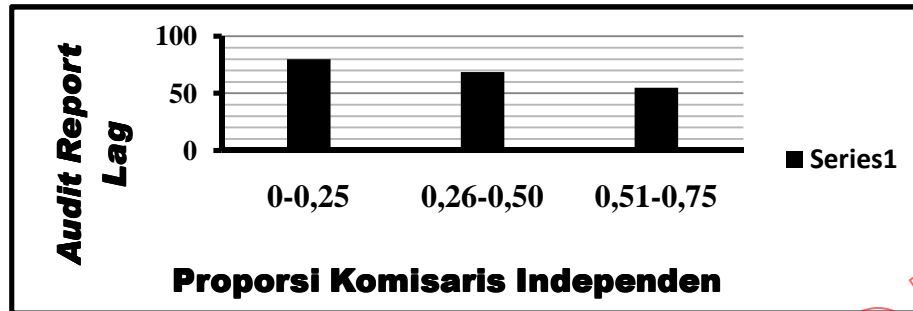
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, ukuran komite audit (ACSIZE) terendah (*minimum*) adalah 2 sedangkan ukuran komite audit (ACSIZE) tertinggi (*maximum*) adalah 4. Rata-rata (*mean*) ukuran komite audit (ACSIZE) dari 66 sampel adalah 3,1061 dengan standar deviasi sebesar 0,35643. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

3. Proporsi Komisaris Independen

Gambar 4.2

Grafik Bivariate

Proporsi Komisaris Independen dan *Audit Report Lag*



Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

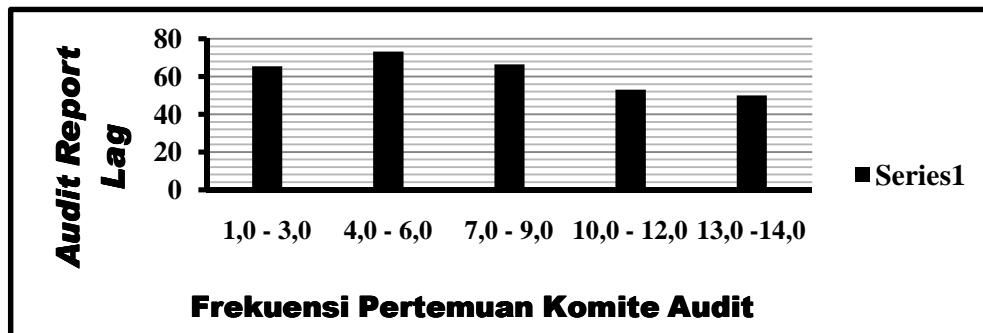
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, proporsi komisaris independen (INDCOM) terendah (*minimum*) adalah 0,25 sedangkan proporsi komisaris independen (INDCOM) tertinggi (*maximum*) adalah 0,67. Rata-rata (*mean*) proporsi komisaris independen (INDCOM) dari 66 sampel adalah 0,39608 dengan standar deviasi sebesar 0,08319. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

4. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Gambar 4.3

Grafik Bivariate

Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan *Audit Report Lag*



Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, frekuensi pertemuan komite audit (ACMEET) terendah (*minimum*) adalah 2 sedangkan frekuensi pertemuan komite audit (ACMEET) tertinggi (*maximum*) adalah 14. Rata-rata (*mean*) frekuensi pertemuan komite audit (ACMEET) dari 66 sampel adalah 5,8636 dengan standar deviasi sebesar 2,83324. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

#### 5. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, ukuran perusahaan (FSIZE) terendah (*minimum*) adalah 12,21 sedangkan ukuran perusahaan (FSIZE) tertinggi (*maximum*) adalah 18,54. Rata-rata (*mean*) ukuran perusahaan (FSIZE) dari 66 sampel adalah 14,8658 dengan standar deviasi sebesar 1,56294. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

#### 6. Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, profitabilitas (ROA) terendah (*minimum*) adalah -0,07 sedangkan profitabilitas (ROA) tertinggi (*maximum*) adalah 0,39. Rata-rata (*mean*) profitabilitas (ROA) dari 66 sampel adalah 0,1159 dengan standar deviasi sebesar 0,09649. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

#### 7. Solvabilitas

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji statistik deskriptif dari 66 sampel penelitian, solvabilitas (TDTA) terendah (*minimum*) adalah 0,00 sedangkan solvabilitas (TDTA) tertinggi (*maximum*) adalah 0,89. Rata-rata (*mean*) solvabilitas (TDTA) dari 66 sampel adalah 0,4359 dengan standar deviasi

sebesar 0,20149. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran datanya normal.

### 4.3. Analisis dan Hasil Pembahasan

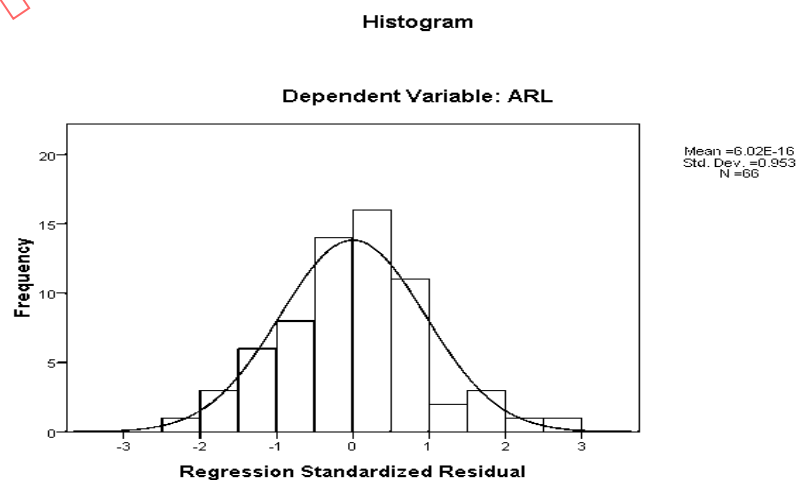
#### 4.3.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar model regresi yang dipakai dalam penelitian ini menghasilkan model yang baik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas (Ghozali, 2009:95).

##### 4.3.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali (2009:147) uji normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafik dan statistik. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yaitu melalui grafik histogram dan grafik normal P-Plot. Hasil analisis grafik dalam penelitian ini dapat terlihat pada gambar 4.4 berikut ini:

**Gambar 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas Grafik**

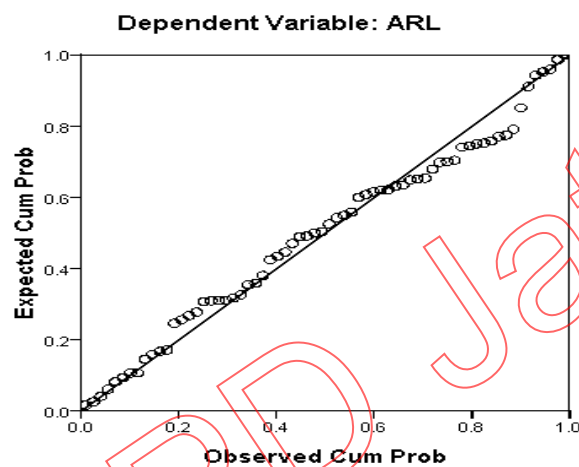


Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat pula dilakukan melalui analisis statistik, salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). jika nilai signifikan lebih dari 5% maka data residual berdistribusi normal. Hasil analisis statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel 4.3 berikut ini:



**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	14.75260269
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.763
Asymp. Sig. (2-tailed)		.605

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat terlihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,763 dengan nilai signifikan 0,605. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal karena nilai signifikan > 5% sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.3.1.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau VIF  $\geq 10$  maka menunjukkan adanya multikolonieritas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	96.765	22.747		4.254	.000		
ACSIZE	6.737	5.924	.130	1.137	.260	.827	1.209
INDCOM	-37.351	25.993	-.168	-1.437	.156	.789	1.268
ACMEET	-2.125	.810	-.325	-2.622	.011	.700	1.429
FSIZE	-1.632	1.580	-.138	-1.033	.306	.605	1.652
ROA	-63.423	22.841	-.330	-2.777	.007	.759	1.317
TDTA	22.738	10.512	.247	2.163	.035	.822	1.216

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance*  $\leq 0,10$ . Dari hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF  $\geq 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

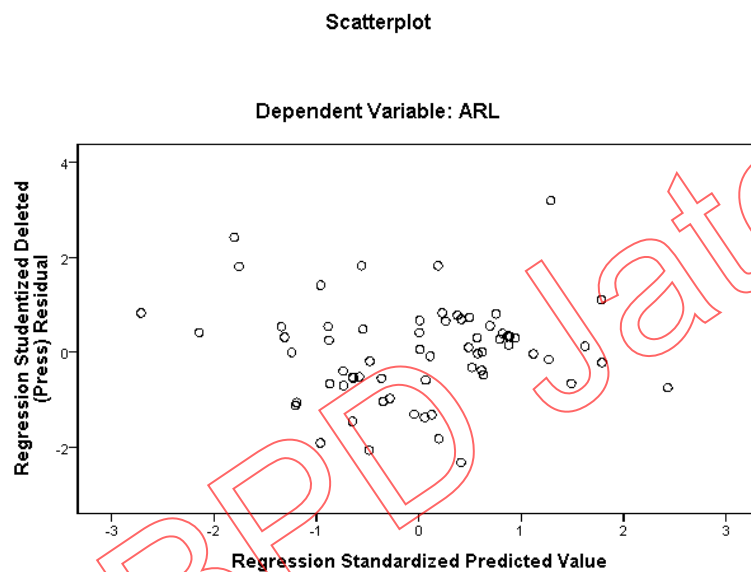
#### 4.3.1.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

Menurut Ghazali (2009:125) cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila dalam grafik tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini:

**Gambar 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot**



Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.6 tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain menggunakan grafik plot, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan uji glejser. Uji ini untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikannya lebih besar dari 5% maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.408	13.750		.757	.452
ACSIZE	-4.631	3.581	-.173	-1.293	.201
INDCOM	22.084	15.712	.193	1.406	.165
ACMEET	.906	.490	.270	1.850	.069
FSIZE	.081	.955	.013	.085	.933
ROA	.415	13.806	.004	.030	.976
TDTA	-.064	6.354	-.001	-.010	.992

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen (ACSIZE, INDCOM, dan ACMEET) dan variabel kontrol (FSIZE, ROA, dan TDTA) yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### 4.3.2. Model Regresi

Analisis regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit (ACSIZE) dengan variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE), profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (TDTA); proporsi komisaris independen (INDCOM) dengan variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE), profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (TDTA); dan frekuensi pertemuan

komite audit (ACMEET) dengan variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE), profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (TDTA) terhadap *audit report lag* (ARL).

Berdasarkan data yang ada, didapat hasil estimasi model regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Koefisien Regresi Variabel Independen**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	96.765	22.747		4.254	.000
ACSIZE	6.737	5.924	.130	1.137	.260
INDCOM	-37.351	25.993	-.168	-1.437	.156
ACMEET	-2.125	.810	-.325	-2.622	.011
FSIZE	-1.632	1.580	-.138	-1.033	.306
ROA	-63.423	22.841	-.330	-2.777	.007
TDTA	22.738	10.512	.247	2.163	.035

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka model regresi linier berganda dalam bentuk persamaan matematis sebagai berikut:

$$ARL = 96,765 + 6,737 ACSIZE - 37,351 INDCOM - 2,125 ACMEET - 1,632 FSIZE - 63,423 ROA + 22,738 TDTA$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 96,765 berarti bahwa apabila prediktor (ACSIZE, INDCOM, ACMEET, FSIZE, ROA, dan TDTA) dianggap konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi naik sebesar 96,765%.

2. Koefisien regresi ACSIZE (ukuran komite audit) sebesar 6,737 berarti bahwa apabila ACSIZE (ukuran komite audit) naik sedangkan variabel lain konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi akan naik sebesar 6,737 %.
3. Koefisien regresi INDCOM (proporsi komisaris independen) sebesar -37,351 berarti bahwa apabila INDCOM (proporsi komisaris independen) naik sedangkan variabel lain konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi akan turun sebesar 37,351%.
4. Koefisien regresi ACMEET (frekuensi pertemuan komite audit) sebesar -2,125 berarti bahwa apabila ACMEET (frekuensi pertemuan komite audit) naik sedangkan variabel lain konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi akan turun sebesar 2,125%.
5. Koefisien regresi FSIZE (ukuran perusahaan) sebesar -1,632 berarti bahwa apabila FSIZE (ukuran perusahaan) naik sedangkan variabel lain konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi akan turun sebesar 1,632%.
6. Koefisien regresi ROA (profitabilitas) sebesar -63,423 berarti bahwa apabila ROA (profitabilitas) naik sedangkan variabel lain konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi akan turun sebesar 63,423%.
7. Koefisien regresi TDTA (solvabilitas) sebesar 22,738 berarti bahwa apabila TDTA (solvabilitas) naik sedangkan variabel lain konstan maka ARL (*audit report lag*) diprediksi akan naik sebesar 22,738%.

#### 4.3.3. Analisis kelayakan model regresi (*Goodness of Fit*)

##### 4.3.3.1. Ukuran Kelayakan Model Regresi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai  $R^2$  adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji Kebaikan Model dengan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 <sup>a</sup>	.366	.301	15.48458

a. Predictors: (Constant), TDTA, INDCOM, ACMEET, ACSIZE, ROA, FSIZE

b. Dependent Variable : ARL

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 30,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel (ACSIZE, INDCOM, ACMEET, FSIZE, ROA, dan TDTA) dalam ketepatan memprediksi variasi variabel *audit report lag* sebesar 30,1% sedangkan sisanya sebesar 69,9% (100% - 30,1%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

#### 4.3.3.2. Uji Kelayakan Model Regresi

Uji kelayakan model regresi digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan  $F < 5\%$  maka variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8153.204	6	1358.867	5.667	.000 <sup>a</sup>
Residual	14146.554	59	239.772		
Total	22299.758	65			

a. Predictors: (Constant), TDTA, INDCOM, ACMEET, ACSIZE, ROA, FSIZE

b. Dependent Variable: ARL

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikan  $< 5\%$ , artinya bahwa semua variabel independen (ACSIZE, INDCOM, dan ACMEET) dan variabel kontrol (FSIZE, ROA, dan TDTA) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (ARL). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel penelitian telah *fit* dengan model regresi yang diajukan sehingga model regresi dapat dikatakan baik dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya yaitu pengujian secara parsial (uji statistik t).

#### 4.3.4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen, hasil pengujian ini dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan mampu menolak atau tidak mampu menolak. Jika nilai signifikan  $t < 5\%$  maka mampu menolak  $H_0$ , dengan kata lain mampu menerima  $H_a$ , artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	96.765	22.747		4.254	.000
ACSIZE	6.737	5.924	.130	1.137	.260
INDCOM	-37.351	25.993	-.168	-1.437	.156
ACMEET	-2.125	.810	-.325	-2.622	.011
FSIZE	-1.632	1.580	-.138	-1.033	.306
ROA	-63.423	22.841	-.330	-2.777	.007
TDTA	22.738	10.512	.247	2.163	.035

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah, 2012



Berdasarkan tabel 4.9 mengenai hasil uji t di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

**1. Ukuran komite audit (AC) berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (ARL) dengan variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE), profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (TDTA)**

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh hasil bahwa nilai signifikan observasi ukuran komite audit sebesar 0,260. Selain itu, dari ketiga variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, yaitu profitabilitas dan solvabilitas dengan nilai signifikansi masing-masing 0,7% dan 3,5%, sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* dan memiliki nilai signifikansi 30,6%. Meskipun penelitian ini telah menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas sebagai variabel kontrol, nilai signifikansi dari variabel ukuran komite audit adalah sebesar 26% dan berada jauh di atas 5%, sehingga tidak mampu menolak  $H_0$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Zaitul (2010) yang mengemukakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Ini dapat menjadi suatu sinyal bagi komite audit agar dapat membantu dewan komisaris secara lebih efektif, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Menurut Sommer (1977) dalam Khomsiyah (2005), banyak komite audit di perusahaan belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Akibatnya, meskipun hampir semua perusahaan telah memiliki komite audit, masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan tahunan.

Menurut Bradbury (1990) dalam Purwati (2006), komite audit dibentuk lebih untuk tujuan kosmetik semata dan bukan untuk meningkatkan pengendalian pemegang saham atas pihak manajemen. Selain itu, Menurut Daniri (2005) dalam Kaihatu (2006), tantangan terkini yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih

belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Hal ini dibuktikan oleh hasil survey kelima yang dilakukan oleh *Asian CG Association* dan telah dipublikasikan pada bulan September 2010 yang menempatkan Indonesia pada urutan kedua terbawah (peringkat 10 dari 11 negara). Peringkat ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* di Indonesia masih belum maksimal.

## **2. Proporsi komisaris independen (INDCOM) berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (ARL) dengan variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE), profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (TDTA)**

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh hasil bahwa nilai signifikan observasi proporsi komisaris independen sebesar 0,156. Selain itu, dari ketiga variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, yaitu profitabilitas dan solvabilitas dengan nilai signifikansi masing-masing 0,7% dan 3,5%, sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* dan memiliki nilai signifikansi 30,6%. Meskipun penelitian ini telah menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas sebagai variabel kontrol, nilai signifikansi dari variabel proporsi komisaris independen adalah sebesar 15,6% dan berada jauh di atas 5%, sehingga tidak mampu menolak  $H_0$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* secara maksimal. Menurut Siregar dan Utama (2006), pengangkatan komisaris independen hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di dalam perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (2000) dalam Hidayah (2008) menyimpulkan bahwa di negara-negara Asia,

termasuk Indonesia, kondisi yang sering terjadi adalah tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dewan komisaris untuk melindungi kepentingan pemegang saham, dan belum dilakukannya pengelolaan perusahaan secara profesional.

### **3. Frekuensi pertemuan komite audit (ACMEET) berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* (ARL) dengan variabel kontrol ukuran perusahaan (FSIZE), profitabilitas (ROA), dan solvabilitas (TDTA)**

Berdasarkan pengujian statistik diperoleh hasil bahwa nilai signifikan observasi frekuensi pertemuan komite audit sebesar 0,011. Selain itu, dari ketiga variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, yaitu profitabilitas dan solvabilitas dengan nilai signifikansi masing-masing 0,7% dan 3,5%, sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag* dan memiliki nilai signifikansi 30,6%. Dengan adanya variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas, nilai signifikan observasi frekuensi pertemuan komite audit menjadi sebesar  $0,011 < 5\%$ , sehingga dapat dikatakan mampu menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas berhasil didukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit, maka *audit report lag* akan semakin pendek. Akan tetapi, jika frekuensi pertemuan komite audit rendah, maka *audit report lag* akan semakin panjang.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Mohamad-Nor, dkk. (2010). Menurut Mohamad-Nor, dkk. (2010) semakin tinggi frekuensi pertemuan komite audit, maka masalah yang dihadapi dalam proses pelaporan keuangan dapat segera diidentifikasi, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Hashim dan Rahman (2011) yang menemukan bahwa jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap *audit report lag*. Hashim dan Rahman (2011) juga menyebutkan bahwa komite audit harus lebih memprioritaskan penyelesaian masalah selama pertemuan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam mengurangi *audit report lag*.

STIE BPD Jateng

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis faktor *corporate governance* terhadap *audit report lag*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,260 yang berada di atas taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Yang berarti bahwa ukuran komite audit tidak berdampak terhadap lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor, meskipun rata-rata jumlah komite audit sudah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan BAPEPAM. Hal ini dikarenakan komite audit dibentuk lebih untuk tujuan kosmetik semata dan bukan untuk meningkatkan pengendalian pemegang saham atas pihak manajemen.
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,156 yang berada di atas taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berdampak terhadap lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di dalam perusahaan.
3. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang berada di bawah taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit, maka semakin

pendek *audit report lag* perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit, maka lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor akan semakin panjang.

## 5.2. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Nilai adjusted R<sup>2</sup> yang rendah sebesar 30,1% mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain yang layak dipertimbangkan sebagai prediktor dari *audit report lag*
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tiga tahun, sehingga belum cukup untuk menentukan tren *audit report lag* perusahaan dalam jangka panjang.

## 5.3. Saran

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan variabel lain sebagai prediktor dari *audit report lag*, seperti struktur kepemilikan perusahaan dan jumlah dewan direksi, independensi dewan direksi, independensi komite audit, dan keahlian keuangan dalam struktur komite audit.
2. Memperpanjang periode pengamatan untuk lebih mengetahui *trend audit report lag*.

## 5.4. Implikasi Manajerial

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi perusahaan mengenai pentingnya penerapan dan penegakan *corporate governance* di dalam perusahaan dalam meningkatkan mekanisme manajemen perusahaan dan kepercayaan para investor. Selain itu, komite audit juga perlu melaksanakan rapat secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena semakin tinggi

frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit akan mengurangi *audit report lag*.

## 2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi mereka pada sebuah perusahaan, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat.

STIE BPD Jateng

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Tarmizi, Rusmin, J. Nelson, Greg, Tower (2009), *The Iniquitous Influence of Family Ownership Structures on Corporate Performance*, *Journal of Global Business Issues*, Vol.3 Issue 1 pp.41.
- Alvin, A., Arens, Randal J. Elder, dan Mark, S. Beasley (2008), *Auditing dan Jasa Assurance, Jilid 1*, (Terjemahan), Jakarta: Erlangga.
- Arifin, Zaenal (2005), Hubungan Antara Corporate Governance dan Variabel Pengurang Masalah Agensi, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 1, No. 10, 39-55.
- Asian Corporate Governance Association (2010), *CG Watch 2010 Corporate Governance in Asia*, tersedia di [www.clsa.com](http://www.clsa.com) (13 Mei 2012).
- Badan Usaha Milik Negara (2002), *Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002.
- Bapepam (2000), *Pembentukan Komite Audit*, Surat Edaran Bapepam No. SE.03/PM/2000.
- Bapepam (2003), *Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-36/PM/2003.
- Baridwan, Zaki (2004), *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: BPFE.
- Boynton, dkk. (2003), *Modern Auditing Buku 1* (Terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bursa Efek Jakarta (2001), *Keanggotaan Komite Audit*, Surat Edaran No: SE-008/BEJ/12-2001.
- Christiawan, Y. J. (2002), Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Reflrksi Hasil Penelitian Empiris, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 2, 79-92.
- Chtourou, S.M., Bedard, Jean and Couteau, Lucie. (2001), *Corporate Governance and Earning Management*, tersedia di [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) (17 November 2011).
- Daniati, N., dan Suhairi (2006). Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor, Dan Size Perusahaan Terhadap Expected Return Saham, *Simposium Nasional Akuntansi 9 (Padang)*, K-AKPM 21, hal. 1-16.
- Darmawan, Agus Dwi (2011), Laporan Keuangan Emiten Terlambat karena Kendala Teknis, tersedia di [www.indonesiainancetoday.com](http://www.indonesiainancetoday.com) (30 April 2012).



- Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (2006), *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance*, Jakarta
- Elqorni, Ahmad (2009), Mengenal Teori Keagenan, tersedia di [elqorni.wordpress.com](http://elqorni.wordpress.com) (23 Januari 2012)
- Ermayanti, Dwi (2010), Kuliah Akuntansi : Audit Keuangan, tersedia di [dwiermayanti.wordpress.com](http://dwiermayanti.wordpress.com) (23 Januari 2012)
- FCGI (2000), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan)*, Booklet Jilid II, Edisi ke-2, Jakarta.
- Ghozali, Imam (2009), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan ke IV*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Givoly, D., & Palmon, D. (1982), Timeliness of annual earnings announcements: Some empirical evidence, *The Accounting Review*, 57, 3, 486–508.
- Halim, Varianada (2000), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay. Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 63-75.
- Hashim , Umami Junaidda, dan Rahman, Rashidah Binti Abdul (2010), Board independence, board diligence, board expertise and impact on audit report lag in Malaysian market, tersedia di [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) (12 November 2011).
- Hashim , Umami Junaidda, dan Rahman, Rashidah Binti Abdul (2011), Audit Report Lag and The Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies, *International Bulletin of Business Administration*, ISSN: 1451-243X Issue 10.
- Hendriksen, Eldon S. (2002), *Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid I*, Jakarta: Erlangga.
- Herawaty, Vinola (2008), Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2, 97-108.
- Hidayah, Erna (2008), Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta, *JAAI*, Vol. 12, No. 1, 53-64.
- Hossain, Minorul Alam. dan Taylor, Peter J. (1998), Examination of Audit Delay: Evidence from Pakistan, *Prosceeding Asian-Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*, Osaka.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2001), *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009), *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.

- Iskandar, Meylisa J. dan Trisnawati, Estralita (2010), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 3, 175-186.
- Jensen, M. C., and W. Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economic*, 3, 305-360.
- Kabarbisnis (2009), Makin Banyak Emiten Terlambat Laporkan LK, tersedia di [www.kabarbisnis.com](http://www.kabarbisnis.com) (14 April 2012).
- Kabarbisnis (2011), Payah! 40 Emiten Telat Bikin Laporan Keuangan, tersedia di [www.kabarbisnis.com](http://www.kabarbisnis.com) (14 April 2012).
- Kaihatu, Thomas S. (2006), Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, 1-9.
- Kasmir (2008), *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Khomsiyah, Azzam Jasin dan Muammar, Aditya (2005), Karakteristik Komite Audit dan Pengungkapan Info, *Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance*, 1-18.
- Lai, Kam Wah. dan Cheuk, Leo C. (2005), Audit Report Lag, Audit Partner Rotation and Audit Firm Rotation: Evidence from Australia, tersedia di [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) (17 November 2011).
- Lianto, Novice dan Kusuma, Budi H. (2010), Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Report Lag, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, 97-106.
- Mohamad- Nor, N.M., Shafie, Rohami., Hussin, Wan Nordin W. (2010), Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia, *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol. 6, No. 2, 57-84.
- Nasser, Etty M. (2008), Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba dan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Intervening, *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, Vol. 8, No. 1, 1-27.
- Petronila, Thio Anastasia (2007), Analisis Skala Perusahaan, Opini Audit, dan Umur Perusahaan atas Audit Delay, *Akuntabilitas*, Vol. 6, No. 2, 129-141.
- Prabandari, Jeane D.M. dan Rustiana (2007), Beberapa Faktor yang Berdampak pada Perbedaan Audit Delay (Studi empiris pada perusahaan-perusahaan keuangan yang terdaftar di BEJ), *Kinerja*, Vol. 11, No. 1, 27-39.
- Purwati, Atiek S. (2006), Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang Tercatat di BEJ, Universitas Diponegoro, *Tesis-Tidak Dipublikasikan*.
- Rachmawati, Sistya (2008), Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1, 1-10.

- Sekaran, Uma (2006), *Metode Penelitian Bisnis, Buku 1*, (Terjemahan), Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Sylvia V.N.P. dan Utama, Siddharta (2006), Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 307-326.
- Siswantaya, I Gede (2007), Mekanisme Corporate Governance dan Manajemen Laba Studi pada Perusahaan –Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Universitas Diponegoro, *Tesis-Tidak Dipublikasikan*.
- Suwardjono (2005), *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat.
- Van Horn, James C, dan Wachowicz, Jr, John M. (2005), *Prinsip Manajemen Keuangan, Buku 1* (Terjemahan), Jakarta : Salemba Empat.
- Walker, Angela and Hay, David (2011), Non-Audit Services and Knowledge Spillovers: An Investigation of the Audit Report Lag, tersedia di [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com) (17 November 2011).
- Weisbach, Michael S. (1988), Outside Directors and CEO Turnover, *Journal of Financial Economics*, 20, 431-460.
- Yuliyanti, Ani (2011), Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay, Universitas Negeri Yogyakarta, *Skripsi-Tidak Dipublikasikan*.
- Yusuf, A. H. (2001), *Auditing I (Pengauditan)*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Zaitul (2010), Board of Directors, Audit Committee, Auditor Characteristics, and Timeliness of Financial Reporting in Listed Company in Indonesia, Universiti Utara Malaysia, *Disertasi-Tidak Dipublikasikan*.

# LAMPIRAN

STIE BPD Jateng

## Lampiran 1

### Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan
1	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	<i>Chemical &amp; Allied Products</i>
2	ASGR	PT Astra-Graphia Tbk	<i>Electronic &amp; Office Equipment</i>
3	ASII	PT Astra International Tbk	<i>Automotive &amp; Allied Products</i>
4	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk	<i>Automotive &amp; Allied Products</i>
5	BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk	<i>Chemical &amp; Allied Products</i>
6	DYNA	PT Dynaplast Tbk	<i>Plastics &amp; Glass Products</i>
7	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	<i>Automotive &amp; Allied Products</i>
8	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	<i>Tobacco Manufacturers</i>
9	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	<i>Cements</i>
10	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	<i>Cables</i>
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	<i>Pharmaceuticals</i>
12	LION	PT Lion Metal Works Tbk	<i>Metal &amp; Allied Products</i>
13	MDRN	PT Modern Internasional Tbk	<i>Photographic Equipment</i>
14	MERK	PT Merck Tbk	<i>Pharmaceuticals</i>
15	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	<i>Food &amp; Beverages</i>
16	SIPD	PT Sierad Produce Tbk	<i>Food &amp; Beverages</i>
17	SMAR	PT SMART Tbk	<i>Food &amp; Beverages</i>
18	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	<i>Cements</i>
19	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	<i>Automotive &amp; Allied Products</i>
20	TIRA	PT Tira Austenite Tbk	<i>Metal &amp; Allied Products</i>
21	TURI	PT Tunas Ridean Tbk	<i>Automotive &amp; Allied Products</i>
22	UNTR	PT United Tractor Tbk	<i>Automotive &amp; Allied Products</i>

Sumber: Laporan Tahunan dan *Indonesian Stock Exchange (IDX)*, data diolah tahun 2012

## Lampiran 2

### Data Audit Report Lag, Ukuran Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas Tahun 2008

No	Kode	Nama Perusahaan	AC Size	IND COMM	AC Meet	Fsize	ROA	TDTA	ARL
1	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	3	0,33	9	15,40	4,30%	60,00%	84
2	ASGR	PT Astra-Graphia Tbk	3	0,33	10	13,64	7,40%	60,40%	51
3	ASII	PT Astra International Tbk	4	0,50	7	18,21	11,00%	50,00%	57
4	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk	3	0,33	7	15,54	14,20%	44,90%	51
5	BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk	3	0,40	6	14,35	1,90%	61,80%	84
6	DYNA	PT Dynaplast Tbk	4	0,25	4	14,03	0,00%	58,00%	86
7	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	3	0,43	4	15,98	-7,20%	80,00%	86
8	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	3	0,33	7	16,60	24,50%	50,00%	79
9	INTP	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	3	0,43	5	16,24	16,00%	24,50%	63
10	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	3	0,50	4	13,04	0,90%	50,90%	84
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	3	0,33	2	15,56	12,39%	7,11%	75
12	LION	PT Lion Metal Works Tbk	3	0,33	2	12,44	14,95%	21,00%	75
13	MDRN	PT Modern Internasional Tbk	3	0,33	6	13,58	0,26%	59,86%	128
14	MERK	PT Merck Tbk	2	0,33	2	12,83	26,29%	12,73%	50
15	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	3	0,40	4	13,76	24,00%	63,00%	69
16	SIPD	PT Sierad Produce Tbk	3	0,50	5	14,14	1,95%	25,39%	79
17	SMAR	PT SMART Tbk	3	0,38	12	16,12	10,40%	48,45%	40
18	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	3	0,43	5	15,92	3,00%	49,00%	40
19	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	3	0,33	4	13,74	10,00%	37,00%	70
20	TIRA	PT Tira Austenite Tbk	3	0,33	12	12,34	0,58%	65,00%	84
21	TURI	PT Tunas Ridean Tbk	4	0,40	4	15,09	6,80%	70,00%	89
22	UNTR	PT United Tractor Tbk	3	0,38	12	16,94	14,80%	21,00%	51

Sumber: Laporan Tahunan dan *Indonesian Stock Exchange (IDX)*, data diolah tahun 2012

### Lampiran 3

#### Data Audit Report Lag, Ukuran Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas Tahun 2009

No	Kode	Nama Perusahaan	AC Size	IND COMM	AC Meet	Fsize	ROA	TDTA	ARL
1	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	3	0,33	10	15,62	4,50%	63,00%	70
2	ASGR	PT Astra-Graphia Tbk	3	0,33	11	13,56	8,60%	50,80%	50
3	ASII	PT Astra International Tbk	4	0,50	7	18,30	11,00%	40,00%	55
4	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk	3	0,33	8	15,35	16,50%	39,30%	50
5	BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk	3	0,40	6	14,28	9,20%	51,00%	82
6	DYNA	PT Dynaplast Tbk	4	0,50	4	14,07	5,10%	56,00%	81
7	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	3	0,43	4	16,00	10,20%	70,00%	76
8	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	3	0,40	8	16,69	28,70%	41,00%	83
9	INTP	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	3	0,43	5	16,40	22,00%	19,37%	62
10	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	3	0,50	4	12,78	0,50%	36,90%	85
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	3	0,33	4	15,68	14,33%	5,24%	70
12	LION	PT Lion Metal Works Tbk	3	0,33	2	12,51	12,39%	16,00%	69
13	MDRN	PT Modern Internasional Tbk	3	0,33	6	13,56	1,56%	57,38%	81
14	MERK	PT Merck Tbk	3	0,33	2	12,98	33,80%	18,39%	54
15	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	3	0,40	4	13,81	34,00%	89,00%	62
16	SIPD	PT Sierad Produce Tbk	3	0,40	6	14,31	2,25%	28,18%	98
17	SMAR	PT SMART Tbk	3	0,38	10	16,14	7,30%	47,74%	40
18	SMCB	PT Holeim Indonesia Tbk	3	0,43	5	15,80	12,00%	29,00%	33
19	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	3	0,33	4	13,76	14,00%	42,00%	76
20	TIRA	PT Tira Austenite Tbk	3	0,25	7	12,21	1,09%	59,00%	76
21	TURI	PT Tunas Ridean Tbk	4	0,40	4	14,39	17,50%	40,00%	85
22	UNTR	PT United Tractor Tbk	3	0,38	14	17,01	16,20%	15,00%	50

Sumber: Laporan Tahunan dan *Indonesian Stock Exchange (IDX)*, data diolah tahun 2012

## Lampiran 4

### Data Audit Report Lag, Ukuran Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas Tahun 2010

No	Kode	Nama Perusahaan	AC Size	IND COMM	AC Meet	Fsize	ROA	TDTA	ARL
1	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	3	0,33	8	15,85	4,10%	63,00%	84
2	ASGR	PT Astra-Graphia Tbk	3	0,33	8	13,80	12,10%	52,50%	49
3	ASII	PT Astra International Tbk	4	0,45	9	18,54	13,00%	50,00%	55
4	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk	3	0,30	4	15,20	20,40%	38,40%	49
5	BUDI	PT Budi Acid Jaya Tbk	3	0,40	6	14,49	2,30%	59,20%	82
6	DYNA	PT Dynaplast Tbk	3	0,67	4	14,26	5,20%	62,00%	47
7	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk	3	0,38	4	16,15	8,00%	70,00%	81
8	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	3	0,40	8	16,84	31,30%	50,00%	75
9	INTP	PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk	3	0,43	4	16,55	23,00%	14,64%	59
10	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk	3	0,50	4	12,91	0,90%	43,60%	84
11	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	3	0,33	4	15,77	18,29%	0,36%	67
12	LION	PT Lion Metal Works Tbk	3	0,33	2	12,62	12,71%	14,00%	70
13	MDRN	PT Modern Internasional Tbk	3	0,33	6	13,58	5,29%	53,57%	84
14	MERK	PT Merck Tbk	3	0,33	4	12,98	27,32%	16,50%	54
15	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	3	0,29	4	13,94	39,00%	59,00%	61
16	SIPD	PT Sierad Produce Tbk	3	0,67	6	14,54	2,97%	40,02%	87
17	SMAR	PT SMART Tbk	3	0,38	12	16,34	10,10%	48,57%	39
18	SMCB	PT Holeim Indonesia Tbk	3	0,57	5	16,16	8,00%	20,00%	31
19	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk	3	0,33	4	13,88	14,00%	47,00%	80
20	TIRA	PT Tira Austenite Tbk	3	0,25	6	12,29	1,81%	56,00%	77
21	TURI	PT Tunas Ridean Tbk	4	0,40	4	14,56	12,80%	40,00%	89
22	UNTR	PT United Tractor Tbk	3	0,50	5	17,21	14,30%	19,00%	55

Sumber: Laporan Tahunan dan *Indonesia Stock Exchange (IDX)*, data diolah tahun 2012



**Lampiran 5**  
**Data Penelitian**

<b>ACSIZE</b>	<b>INDCOMM</b>	<b>ACMEET</b>	<b>FSIZE</b>	<b>ROA</b>	<b>TDTA</b>	<b>ARL</b>	<b>RES_1</b>	<b>AbsUt</b>	<b>RES_2</b>
3.0	0.33	9.0	15.4	0.04	0.6	84.0	12.49603	12.50	-0.68248
3.0	0.33	10.0	13.64	0.07	0.6	51.0	-19.34856	19.35	5.39384
4.0	0.5	7.0	18.21	0.11	0.5	57.0	-7.84215	7.84	-2.91018
3.0	0.33	7.0	15.54	0.14	0.45	51.0	-14.77198	14.77	3.34290
3.0	0.4	6.0	14.35	0.02	0.62	84.0	5.29984	5.30	-6.61244
4.0	0.25	4.0	14.03	0.0	0.58	86.0	-10.17076	10.17	8.04569
3.0	0.43	4.0	15.98	-0.07	0.8	86.0	-2.97006	2.97	-7.87572
3.0	0.33	7.0	16.6	0.25	0.5	79.0	20.79742	20.80	9.24023
3.0	0.43	5.0	16.24	0.16	0.24	63.0	3.89937	3.90	-8.00457
3.0	0.5	4.0	13.04	0.01	0.51	84.0	4.51475	4.51	-7.69118
3.0	0.33	2.0	15.56	0.12	0.07	75.0	6.00890	6.01	-0.90816
3.0	0.33	2.0	12.44	0.15	0.21	75.0	-0.36297	0.36	-6.30559
3.0	0.33	6.0	13.58	0.0	0.6	128.0	44.61502	44.62	34.31788
2.0	0.33	2.0	12.83	0.26	0.13	50.0	-9.19369	9.19	-2.18826
3.0	0.4	4.0	13.76	0.24	0.63	69.0	-1.18665	1.19	-8.95684
3.0	0.5	5.0	14.14	0.02	0.25	79.0	9.98051	9.98	-3.24094
3.0	0.38	12.0	16.12	0.1	0.48	40.0	-15.55341	15.55	-1.53781
3.0	0.43	5.0	15.92	0.03	0.49	40.0	-33.55225	33.55	21.74409
3.0	0.33	4.0	13.74	0.1	0.37	70.0	-5.80134	5.80	-2.75309
3.0	0.33	12.0	12.34	0.01	0.65	84.0	10.83723	10.84	-4.79621
4.0	0.4	4.0	15.09	0.07	0.7	89.0	1.87279	1.87	-3.67196

3.0	0.38	12.0	16.94	0.15	0.21	51.0	6.09501	6.10	-11.10043
3.0	0.33	10.0	15.62	0.05	0.63	70.0	0.93186	0.93	-13.17258
3.0	0.33	11.0	13.56	0.09	0.51	50.0	-15.03953	15.04	0.17131
4.0	0.5	7.0	18.3	0.11	0.4	55.0	-7.42152	7.42	-3.34446
3.0	0.33	8.0	15.35	0.17	0.39	50.0	-10.69035	10.69	-1.64558
3.0	0.4	6.0	14.28	0.09	0.51	82.0	10.12638	10.13	-1.81633
4.0	0.5	4.0	14.07	0.05	0.56	81.0	-2.14172	2.14	-5.52971
3.0	0.43	4.0	16.0	0.1	0.7	76.0	0.11829	0.12	-10.80607
3.0	0.4	8.0	16.69	0.29	0.41	83.0	34.26692	34.27	20.22829
3.0	0.43	5.0	16.4	0.22	0.19	62.0	8.10273	8.10	-3.84223
3.0	0.5	4.0	12.78	0.01	0.37	85.0	8.27375	8.27	-3.92011
3.0	0.33	4.0	15.68	0.14	0.05	70.0	7.17737	7.18	-1.57079
3.0	0.33	2.0	12.51	0.12	0.16	69.0	-7.01456	7.01	0.34961
3.0	0.33	6.0	13.56	0.02	0.57	81.0	-0.46702	0.47	-9.83873
3.0	0.33	2.0	12.98	0.34	0.18	54.0	-7.74925	7.75	0.95627
3.0	0.4	4.0	13.81	0.34	0.89	62.0	-7.67453	7.67	-2.49793
3.0	0.4	6.0	14.31	0.02	0.28	98.0	26.96537	26.97	15.03463
3.0	0.38	10.0	16.14	0.07	0.48	40.0	-21.67291	21.67	6.40437
3.0	0.43	5.0	15.8	0.12	0.29	33.0	-30.49245	30.49	18.64385
3.0	0.33	4.0	13.76	0.14	0.42	76.0	1.63134	1.63	-6.93813
3.0	0.25	7.0	12.21	0.01	0.59	76.0	-9.62236	9.62	0.29192
4.0	0.4	4.0	14.39	0.18	0.4	85.0	10.52837	10.53	4.97534
3.0	0.38	14.0	17.01	0.16	0.15	50.0	11.45718	11.46	-7.56374
3.0	0.33	8.0	15.85	0.04	0.63	84.0	10.42350	10.42	-1.88353
3.0	0.33	8.0	13.8	0.12	0.53	49.0	-20.57411	20.57	8.39307
4.0	0.45	9.0	18.54	0.13	0.5	55.0	-5.65332	5.65	-5.84160

3.0	0.3	4.0	15.2	0.2	0.38	49.0	-19.42448	19.42	11.37376
3.0	0.4	6.0	14.49	0.02	0.59	82.0	4.21042	4.21	-7.71508
3.0	0.67	4.0	14.26	0.05	0.62	47.0	-24.10890	24.11	8.04048
3.0	0.38	4.0	16.15	0.08	0.7	81.0	2.22703	2.23	-7.59693
3.0	0.4	8.0	16.84	0.31	0.5	75.0	25.73377	25.73	11.68046
3.0	0.43	4.0	16.55	0.23	0.15	59.0	4.76652	4.77	-6.29134
3.0	0.5	4.0	12.91	0.01	0.44	84.0	5.89425	5.89	-6.30564
3.0	0.33	4.0	15.77	0.18	0.0	67.0	7.99805	8.00	-0.77718
3.0	0.33	2.0	12.62	0.13	0.14	70.0	-4.74607	4.75	-1.93319
3.0	0.33	6.0	13.58	0.05	0.54	84.0	5.15044	5.15	-5.17129
3.0	0.33	4.0	12.98	0.27	0.17	54.0	-7.71205	7.71	-0.86434
3.0	0.29	4.0	13.94	0.39	0.59	61.0	-2.57859	2.58	-5.21499
3.0	0.67	6.0	14.54	0.03	0.4	87.0	24.33128	24.33	6.42268
3.0	0.38	12.0	16.34	0.1	0.49	39.0	-16.42179	16.42	-0.68656
3.0	0.57	5.0	16.16	0.08	0.2	31.0	-27.16634	27.17	12.20771
3.0	0.33	4.0	13.88	0.14	0.47	80.0	4.69027	4.69	-3.88569
3.0	0.4	4.0	14.27	0.0	0.82	105.0	16.10385	16.10	6.03094
4.0	0.4	4.0	14.56	0.13	0.4	89.0	11.63462	11.63	6.08862
3.0	0.5	5.0	17.21	0.14	0.19	55.0	-0.03475	0.03	-13.48833

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

## Lampiran 6

### Hasil Olah Data

#### Statistik Deskriptif

##### *Audit Report Lag* Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ARL	66	31.00	128.00	68.9394	18.52224
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

#### Statistik Deskriptif

##### Ukuran Komite Audit Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACSIZE	66	2.00	4.00	3.1061	.35643
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

#### Statistik Deskriptif

##### Proporsi Komisaris Independen Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INDCOMM	66	.25	.67	.3908	.08319
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

#### Statistik Deskriptif

##### Frekuensi Pertemuan Komite Audit Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACMEET	66	2.00	14.00	5.8636	2.83324
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Statistik Deskriptif

#### Ukuran Perusahaan

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FSIZE	66	12.21	18.54	14.8658	1.56294
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Statistik Deskriptif

#### Profitabilitas

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	66	-.07	.39	.1159	.09649
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Statistik Deskriptif

#### Solvabilitas

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TDTA	66	.00	.89	.4359	.20149
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Hasil Koefisien Regresi Variabel Independen

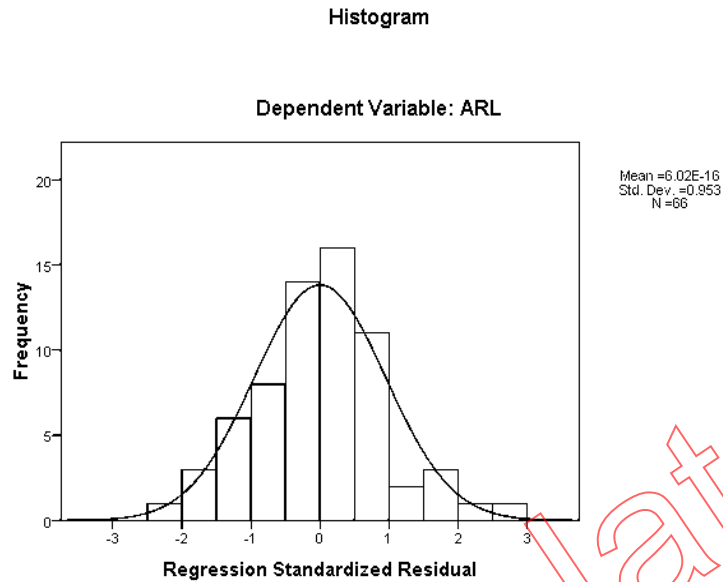
#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	96.765	22.747		4.254	.000
	ACSIZE	6.737	5.924	.130	1.137	.260
	INDCOMM	-37.351	25.993	-.168	-1.437	.156
	ACMEET	-2.125	.810	-.325	-2.622	.011
	FSIZE	-1.632	1.580	-.138	-1.033	.306
	ROA	-63.423	22.841	-.330	-2.777	.007
	TDTA	22.738	10.512	.247	2.163	.035

a. Dependent Variable: ARL

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

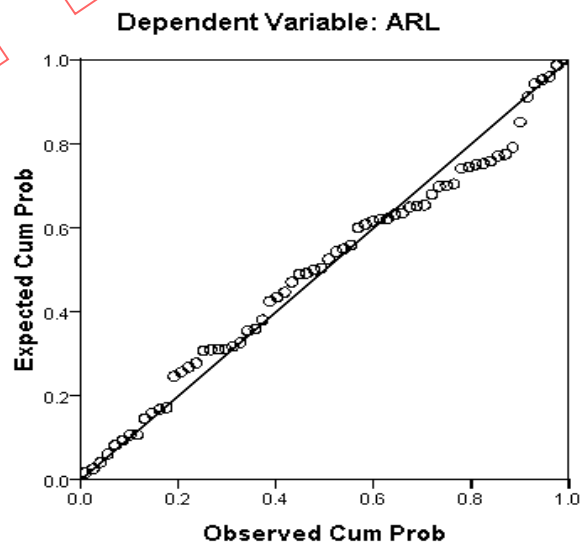
## Hasil Uji Normalitas Grafik



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

## Hasil Uji Normalitas dengan grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	14.75260269
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.763
Asymp. Sig. (2-tailed)		.605

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Hasil Uji Multikolonieritas

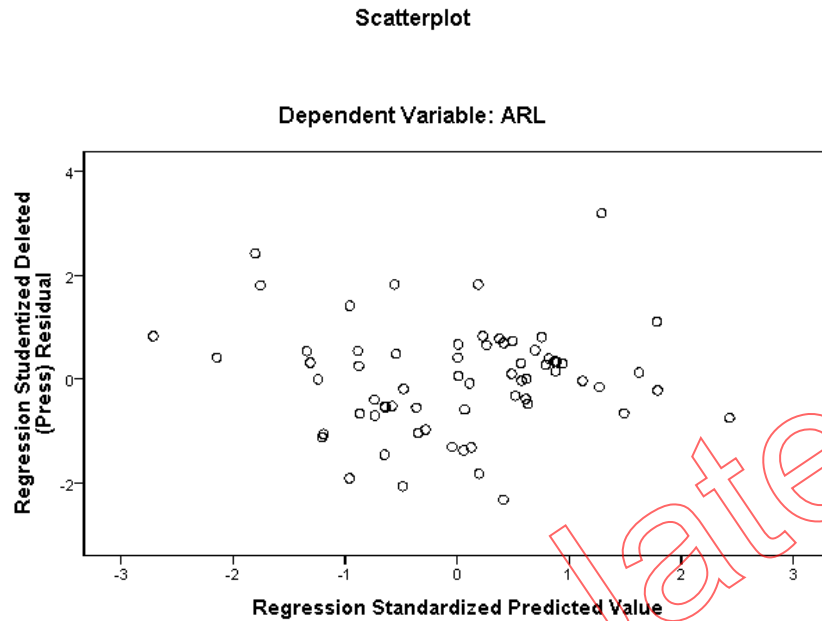
#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	96.765	22.747		4.254	.000		
ACSIZE	6.737	5.924	.130	1.137	.260	.827	1.209
INDCOM	-37.351	25.993	-.168	-1.437	.156	.789	1.268
ACMEET	-2.125	.810	-.325	-2.622	.011	.700	1.429
FSIZE	-1.632	1.580	-.138	-1.033	.306	.605	1.652
ROA	-63.423	22.841	-.330	-2.777	.007	.759	1.317
TDTA	22.738	10.512	.247	2.163	.035	.822	1.216

a. Dependent Variable: ARL

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

### Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2012

### Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.408	13.750		.757	.452
ACSIZE	-4.631	3.581	-.173	-1.293	.201
INDCOM	22.084	15.712	.193	1.406	.165
ACMEET	.906	.490	.270	1.850	.069
FSIZE	.081	.955	.013	.085	.933
ROA	.415	13.806	.004	.030	.976
TDTA	-.064	6.354	-.001	-.010	.992

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012



### Uji Kebaikan Model dengan Koefisien Determinasi

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 <sup>a</sup>	.366	.301	15.48458

a. Predictors: (Constant), TDTA, INDCOMM, ACMEET, ACSIZE, ROA, FSIZE

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

### Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8153.204	6	1358.867	5.667	.000 <sup>a</sup>
Residual	14146.554	59	239.772		
Total	22299.758	65			

a. Predictors: (Constant), TDTA, INDCOM, ACMEET, ACSIZE, ROA, FSIZE

b. Dependent Variable: ARL

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

### Hasil Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	96.765	22.747		4.254	.000
	ACSIZE	6.737	5.924	.130	1.137	.260
	INDCOM	-37.351	25.993	-.168	-1.437	.156
	ACMEET	-2.125	.810	-.325	-2.622	.011
	FSIZE	-1.632	1.580	-.138	-1.033	.306
	ROA	-63.423	22.841	-.330	-2.777	.007
	TDTA	22.738	10.512	.247	2.163	.035

a. Dependent Variable: ARL

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Vicky Tika Pratiwi  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 21 September 1990  
Alamat : Ds. Kebon Rt. 02/06, Wonokerso, Kec. Tembarak,  
Temanggung, Jawa Tengah 56261  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tinggi/Berat : 150/40  
Golongan Darah : A  
No Hp : 085727210117  
E-mail : [vickytikap@yahoo.com](mailto:vickytikap@yahoo.com)

### Pendidikan Formal

1996 - 2002	SD Negeri 03 Peterongan
2002 - 2005	SMP Negeri 1 Tembarak
2005 - 2008	SMK Negeri 3 Magelang
2008 - 2012	STIE Bank BPD Jateng

# **KARTU BIMBINGAN**

STIE BPD Jateng